

**ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK)
DAN UNIT PENGELOLA SOSIAL (UPS) DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA BKM NGUDI
MAKMUR DESA SEMANU KECAMATAN SEMANU
GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk memenuhi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Disusun Oleh:
Arum Danarti Purnomo
11404241024

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

PERSETUJUAN

**ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK)
DAN UNIT PENGELOLA SOSIAL (UPS) DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA BKM NGUDI
MAKMUR DESA SEMANU KECAMATAN SEMANU
GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

Oleh:

ARUM DANARTI PURNOMO

NIM. 11404241024

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 16 Juni 2015

Untuk dipertahankan di depan TIM Penguji Skripsi

Program Studi Pendidikan Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Dr. Sukidjo, M.Pd

NIP. 19500906 197412 1 001

PENGESAHAN

ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK) DAN UNIT PENGELOLA SOSIAL (UPS) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA BKM NGUDI MAKMUR DESA SEMANU KECAMATAN SEMANU GUNUNGKIDUL

SKRIPSI

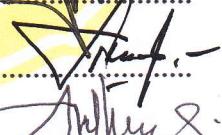
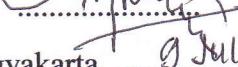
Oleh:

ARUM DANARTI PURNOMO

NIM. 11404241024

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Juni 2015 dan dinyatakan lulus.

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Bambang Suprayitno, M.Sc	Ketua Penguji		9 Juli 2015
Dr. Sukidjo, M.Pd	Sekretaris Penguji		6 Juli 2015
Sri Sumardiningsih, M.Si	Penguji Utama		6 Juli 2015

Yogyakarta, 9 Juli 2015

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Sugiharsono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : ARUM DANARTI PURNOMO
NIM : 11404241024
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan
Unit Pengelola Sosial (UPS) Dalam Penanggulangan
Kemiskinan Pada BKM Ngudi Makmur Desa Semanu
Kecamatan Semanu Gunungkidul

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak berisi materi yang dipublikasikan oleh orang lain, kecuali pada bagian tertentu saya ambil sebagai acuan/kutipan dengan tata tulis karya ilmiah yang berlaku.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Juni 2015

Yang Menyatakan



Arum Danarti Purnomo

NIM. 11404241024

MOTTO

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
(QS. Ar Rad 13:11)*

*Mengapa lelah? Sementara Allah SWT sudah menyemangati kita dengan hayya' alal
falah, bahwa jarak kemenangan hanya sebatas kening dan sajadah.*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta dan kasih sayang, kupersembahkan karya ini kepada:

Bapak dan Mama terkasih Sudal dan Wartini.

*Terima kasih telah memberiku segalanya, membimbing sebelum kaki ini salah
melangkah dan do'a yang selalu terlantun untukku.*

Dan ku bingkisan karya ini untuk:

Adik tercintaku Finka Aulina

Terima kasih telah menjadi saudara terbaik untukku

**ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK) DAN UNIT
PENGELOLA SOSIAL (UPS) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PADA BKM NGUDI MAKMUR DESA SEMANU KECAMATAN SEMANU
GUNUNGKIDUL**

**Oleh:
ARUM DANARTI PURNOMO
11404241024**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kesesuaian penerima pinjaman bergulir UPK BKM Ngudi Makmur dengan kriteria kemiskinan BPS, (2) kesesuaian peserta pelatihan kewirausahaan UPS BKM Ngudi Makmur dengan kriteria kemiskinan BPS, (3) kinerja UPK BKM Ngudi Makmur Desa Semanu dalam pengelolaan pinjaman bergulir, (4) kinerja UPS BKM Ngudi Makmur Desa Semanu dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian yaitu seluruh peserta pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh UPS BKM Ngudi Makmur yang sekaligus sebagai penerima manfaat pinjaman bergulir yang dilaksanakan oleh UPK BKM Ngudi Makmur yang berjumlah 84 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerima manfaat dari pinjaman bergulir tidak sesuai dengan kriteria kemiskinan BPS karena sebagian besar bukan warga miskin sehingga tidak tepat sasaran, (2) peserta pelatihan kewirausahaan tidak sesuai dengan kriteria kemiskinan BPS karena sebagian besar bukan warga miskin sehingga tidak tepat sasaran, (3) kinerja UPK BKM Ngudi Makmur dalam pengelolaan pinjaman bergulir menunjukkan kondisi memadai dengan perolehan total 69,048%; sangat memadai sebesar 29,762%; dan kurang memadai sebesar 1,190% (4) kinerja UPS BKM Ngudi Makmur dalam melaksanakan pelatihan kewirausahaan menunjukkan kondisi memadai sebesar 70,239%; kurang memadai sebesar 20,239%; dan 9,524 % menunjukkan sangat memadai.

Kata Kunci : Kinerja, Pengelola, Keuangan, Sosial

**AN ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE FINANCIAL
MANAGEMENT UNIT (FMU) AND THE SOCIAL MANAGEMENT UNIT
(SMU) IN THE POVERTY ALLEVIATION AT BKM NGUDI MAKMUR,
SEMANU VILLAGE, SEMANU DISTRICT, GUNUNGKIDUL**

Arum DanartiPurnomo

11404241024

ABSTRACT

This study aims to investigate: (1) the suitability of those receiving revolving loans at FMU of BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat:Community Self-supporting Agency)NgudiMakmur for the poverty criteria by the Central Bureau of Statistics (CBS), (2) the suitability of participants in the entrepreneurship training by SMU of BKM NgudiMakmur for the poverty criteria by CBS, (3) the performance of FMU of BKM NgudiMakmur, Semanu Village, in the revolving loans management, and (4) the performance of SMU of BKM NgudiMakmur, Semanu Village, in the implementation of the entrepreneurship training.

This was a quantitative descriptive study. The research population comprised all participants of the entrepreneurship training conducted by SMU of BKM NgudiMakmur who simultaneously received the benefits of revolving loans provided by FMU of BKM NgudiMakmur with a total of 84 people. The data were collected through a questionnaire and documentation. They were analyzed by the descriptive technique.

The results of the study are as follows. (1) Those receiving the benefits of revolving loans are not suitable for the criteria by CBS because most of them are not poor so that the target is not appropriate. (2) The participants of the entrepreneurship training are not suitable for the criteria by CBS because most of them are not poor so that the target is not appropriate. (3) The performance of FMU NgudiMakmur's BKM in the revolving loans management shows an adequate condition with a percentage of 69.048%; very adequate 29.762%, and least adequate 1.190% (4) The performance of SMUNgudiMakmur's BKM in the implementation of the entrepreneurship training shows an adequate condition with a percentage of 70.239%, least adequate 20.239%; and very adequate 9.524%.

Keywords: Performance, Management, Financial, Social

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Sosial (UPS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada BKM Ngudi Makmur Desa Semanu Kecamatan Semanu Gunungkidul” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meraih gelar Sarjana Pendidikan.

Dalam pembuatan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan kelancaran pelaksanaan penelitian dan izin untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ali Muhsin, M.Pd pembimbing dan penasihat akademik yang selalu memberikan arahan, saran, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. Sukidjo, M.Pd, dosen pembimbing, terima kasih atas waktu dan kesabaran yang diberikan untuk memberikan bimbingan, masukan, saran, kritik, dan motivasi selama menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Sri Sumardinigsih, M.Si , narasumber dan penguji utama yang telah memberikan bimbingan, masukan serta kelancaran selama menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Bambang Suprayitno, M.Sc, ketua penguji skripsi yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Ekonomi, terima kasih atas segala bimbingan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat.
8. Mas Dating Sudrajad, admin jurusan pendidikan ekonomi yang telah membantu selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap staf karyawan Fakultas Ekonomi UNY yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalani studi.
10. Pemerintah Desa Semanu dan Pengurus BKM Ngudi Makmur Desa Semanu khususnya Bapak Kuwat, Mbak Ning, Ibu Ely, Ibu Anjar, yang telah memberikan izin penelitian, bantuan dan kelancaran selama menyelesaikan skripsi.
11. Simbah Karnoto, Mbah Wasirah, Mbah Sumi, Om Suharyono, Tante Rusyantiningsih, keluarga besar Trah Wongso Taruno yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Ibu Warsiyem. Terimakasih selalu memberi bimbingan, kasih sayang, kebersamaan dan motivasi dalam menuntut ilmu.
12. Wahid Hidayanta, yang selalu menjadi pendengar yang sabar saat saya mengeluh, memberikan dukungan, bimbingan, kebersamaan, motivasi dan keceriaan.
13. Novia Kusumaningsih, Risna Pramudita Willy, Pitma Pertiwi, Annisa, Dewi Panda, Dwi Sulistyaningrum, Rizky Putri, Dewi Irul, Mei Nikhi teman-teman yang telah memberiku dukungan, bimbingan, kebersamaan, dan keceriaan.

14. Riska, Hesti, Indah R, Indah P, Mbak Nanik, Nisa Siti, Nuraini, dan keluarga besar Pendidikan Ekonomi angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya kelas A. Terima kasih atas kebersamaan yang telah diberikan.
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga harapan peneliti yang terkandung dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 16 Juni 2015

Penulis,



Arum Danarti Purnomo

NIM. 11404241024

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGATAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II. KAJIAN TEORI	13
A. Deskripsi Teori.....	13
1. Kemiskinan	13
a. Konsep Kemiskinan	13
b. Faktor Penyebab Kemiskinan	15
c. Indikator Kemiskinan.....	18
d. Upaya Pengendalian Kemiskinan	21
2. Kinerja.....	25
a. Pengertian Kinerja	25

b. Indikator Kinerja.....	26
c. Evaluasi Kinerja.....	31
3. Pemberdayaan Masyarakat	32
a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	32
b. Tujuan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	34
4. PNPM Mandiri Perkotaan.....	36
a. Pengertian PNPM Mandiri Perkotaan.....	36
b. Tujuan dan Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan	38
5. Badan Keswadayaan Masyarakat	41
a. Pengertian BKM	41
b. Unit Pengelola Keuangan	45
c. Unit Pengelola Sosial	53
B. Penelitian Relevan	55
C. Kerangka Pemikiran.....	57
 BAB III. METODE PENELITIAN	 60
A. Desain Penelitian	60
B. Definisi Oprasional Variabel	60
1. Kemiskinan	60
2. Kinerja UPK	61
3. Kinerja UPS	62
C. Tempat dan Waktu penelitian	63
D. Populasi.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
1. Observasi	64
2. Angket.....	64
3. Dokumentasi	65
F. Instrumen Penelitian	65
G. Uji Instrumen	68
1. Uji Validitas	68
2. Uji Reliabilitas	71
H. Metode dan Analisis Data Penelitian.....	72
1. Analisis Deskriptif	72
2. <i>Poverty Reduction</i>	74
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 76
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	76
1. Gambaran Umum Desa Semanu.....	76
a. Letak dan Kondisi Daerah	76
b. Keadaan Penduduk	78
2. Profil BKM Ngudi Makmur Desa Semanu.....	82

a. Sejarah Singkat BKM Ngudi Makmur	82
b. Kegiatan BKM Ngudi Makmur	83
1) Kegiatan Unit Pengelola Keuangan (UPK)	85
2) Kegiatan Unit Pengelola Sosial (UPS)	91
3) Kegiatan Unit Pengelola Lingkungan (UPL).....	92
B. Hasil Penelitian	96
1. Karakteristik Responden.....	96
a. Jenis Usaha	96
b. Jumlah Pinjaman.....	98
2. Kesesuaian Penerima Manfaat Kegiatan Pinjaman Bergulir dan Kegiatan Peatihan Kewirausahaan dengan Kriteria Kemiskinan BPS	100
3. Kinerja Unit Pengelola Keuangan	103
4. Kinerja Unit Pengelola Sosial.....	104
5. <i>Poverty Reduction</i>	107
C. Pembahasan	108
1. Kesesuaian Penerima Manfaat Kegiatan Pinjaman Bergulir dan Kegiatan Peatihan Kewirausahaan dengan Kriteria Kemiskinan BPS	109
2. Kinerja Unit Pengelola Keuangan (UPK).....	110
3. Kinerja Unit Pengelola Sosial (UPS).....	111
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
C. Keterbatasan Penelitian.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Persentase Penduduk Miskin, ,Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks KeparahanKemiskinan (P2), dan Indeks Gini Indonesia Tahun 2010-2013.....	2
2. Indikator Kinerja UPK dalam Pengelolaan Pinjaman Bergulir	61
3. Indikator Kinerja UPS dalam Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan....	62
4. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	66
5. Uji Validitas Instrumen Kinerja UPK	69
6. Uji Validitas Instrumen Kinerja UPS.....	70
7. Daftar Dusun, Jumlah Penduduk, dan Jumlah KK Miskin Desa Semanu Tahun 2015	77
8. Jumlah Penduduk Desa Semanu Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014	78
9. Pembagian Penduduk Desa Semanu Menurut Jenis Pekerjaan.....	79
10. Standar Minimal Pelayanan Fasilitas Publik dan Kepemilikan Fasilitas Publik Desa Semanu	80
11. Jumlah Penduduk Miskin danPersentase Penduduk Miskin Desa Semanu Tahun 2001-2015	81
12. Perolehan Dana BLM BKM Ngudi Makmur Tahun 2000-2010	84
13. Alokasi Penggunaan Dana BLM Ngudi Makmur Tahun 2000-2010	85
14. Perbandingan Bunga Kredit Usaha Bank Umum, BPR,dan UPK BKM Ngudi Makmur Desa Semanu	89
15. Realisasi Pinjaman UPK BKM Ngudi Makmur Tahun 2004-Maret 2015	90
16. Kegiatan UPS BKM Ngudi Makmur dari tahun 2004-2014.....	91
17. Kegiatan UPL BKM Ngudi Makmur dari Tahun 2004-2014	93
18. Rincian Sumber Dana dan Nilai Proyek UPL BKM Ngudi Makmur Tahun 2000-2014	94
19. Jenis Usaha dan Rata-Rata Modal Responden.....	97
20. Rata-Rata Pinjaman dan Rata-Rata Laba Setiap Jenis Usaha	99
21. Data Kemiskinan Pemanfaat Program Pinjaman Bergulir dan Pelatihan Kewirausahaan Sebelum dan Sesudah Program Berjalan.....	101
22. Kinerja UPK BKM Ngudi Makmur dalam Pengelolaan Pinjaman Bergulir	103
23. Pelatihan Kewirausahaan UPS BKM Ngudi Makmur.....	104
24. Kinerja UPS BKM Ngudi Makmur dalam Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan	105

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan.....	16
2. Akar Penyebab Kemiskinan.....	17
3. Penanggulangan Kemiskinan oleh Masyarakat melalui PNPM-MP.....	24
4. Paradigma Penelitian.....	59
5. Rata-Rata Jumlah Pinjaman Responden.....	98
6. Manfaat Pelatihan Kewirausahaan.....	107

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN		Halaman
1. Instrumen Penelitian		126
2. Daftar Responden.....		140
3. Pengkategorian Jawaban Responden		143
4. Hasil Uji Koefisien Korelasi Pearson		153
5. Surat Ijin Penelitian.....		157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini menimbulkan dampak sosial, ekonomi, politik bagi bangsa Indonesia. Sektor ekonomi seperti industri, properti, perbankan hingga pertambangan ternyata tidak mampu bertahan menghadapi krisis. Akhirnya berbagai permasalahan terjadi, seperti meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, tingginya angka PHK, bertambahnya jumlah penduduk yang menganggur hingga kurangnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut merupakan indikasi berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan. Kondisi ini diperparah dengan tinginya ketimpangan yang terjadi antara penduduk kelas atas dengan penduduk kelas bawah sehingga terbentuk jurang pemisah yang cukup lebar antar keduanya.

Jika dilihat, jumlah kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Akan tetapi penurunan tingkat kemiskinan tersebut tidak disertai dengan penurunan indeks gini. Indeks gini adalah suatu ukuran umum yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Berikut adalah table perkembangan jumlah penduduk miskin dan indeks gini Indonesia dari tahun 2010-2013.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, dan Indeks Gini Indonesia Tahun 2010-2013

Tahun	2010	2011	2012	2013
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,330	12,490	11,660	11,470
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,210	2,080	1,900	1,890
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,580	0,550	0,490	0,480
Indeks Gini	0,380	0,410	0,410	0,413

Sumber: BPS, 2015

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa selama periode 2010- 2013 jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang sedikit demi sedikit.. Selain tingkat kemiskinan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2). Menurut Tulus Tambunan (2012:193), Kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas miskin (garis kemiskinan yang berlaku). Sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran dari penduduk paling miskin, atau yang makin jatuh di bawah garis kemiskinan yang berlaku. Semakin besar nilai kedua indeks ini di sebuah negara mencerminkan semakin seriusnya persoalan kemiskinan di negara tersebut.

Penurunan indeks kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari tahun ke tahun semakin naik mendekati garis kemiskinan yang berarti semakin sejahteranya penduduk miskin. Sedangkan jika dilihat dari indeks keparahannya menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran pada penduduk miskin semakin menyempit. Tinggi

rendahnya indeks kedalaman kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya garis kemiskinan pada masyarakat. Seperti batasan yang telah dibuat oleh Bank Dunia, penduduk dikatakan “miskin” apabila pendapatanya kurang dari US\$2 per hari. Bank Dunia membuat garis kemiskinan absolut dengan US\$ per hari bukan dengan nilai tukar US\$ resmi dengan tujuan untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara/ wilayah dan perkembangannya menurut waktu untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam memerangi kemiskinan (Bappenas, 2010: 15)

Walaupun persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan berkurang. Hal yang sebaliknya terjadi pada indeks gini. Dari tahun 2010-2013 indeks gini di Indonesia mengalami kenaikan. Kenaikan indeks gini mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang terjadi antara penduduk lapisan atas dengan penduduk lapisan bawah. Menurut Bappenas (2012: 3-4) penyebab semakin tingginya ketimpangan di Indonesia adalah masyarakat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Walaupun seluruh rumah tangga baik miskin maupun kaya mengalami kesejahteraan akan tetapi terdapat kecenderungan di mana golongan bawah tingkat konsumsinya lebih rendah jika di bandingkan dengan golongan atas.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Tingkat kemiskinan sendiri didapatkan dengan membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau

jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, tidak hanya masalah ekonomi saja akantetapi kondisi sosial masyarakat, kondisi politik dan lingkungan juga dapat menjadi penyebab kemiskinan tersebut terjadi. Masalah-masalah baik sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik tersebut kemudian saling terkait hingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan yang tidak berujung

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Bahkan saat ini kemiskinan sudah menjadi masalah global yang penanggulangannya tidak hanya melibatkan negara yang bersangkutan akantetapi beberapa negara membentuk kesepakatan untuk menanggulangi bersama masalah kemiskinan tersebut. Kesepakatan yang dibentuk untuk menanggulangi kemiskinan global tersebut salah satunya adalah *Milenium Development Goal's* yang tujuannya adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara berkembang salah satunya melalui pendidikan dan kesehatan.

Menurut Tulus Tambunan (2012: 195), kebijakan-kebijakan yang pro terhadap penduduk miskin sangat diperlukan agar program penanggulangan kemiskinan memiliki dampak yang positif bagi penduduk, terutama kebijakan yang bersifat produktif seperti perluasan akses pendidikan untuk semua orang (khususnya pendidikan dasar), pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan yang bersifat produktif tersebut tidak hanya mampu mengurangi kemiskinan

akantetapi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan koordinasi yang kompleks dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Penanggulangan kemiskinan yang terjadi selama ini cenderung parsial dan berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak adanya koordinasi yang baik antar berbagai pihak hal ini menyebabkan kurang efektifnya hasil yang didapatkan dari program penanggulangan kemiskinan tersebut. Hingga sekarang ini sudah banyak program penanggulangan kemiskinan yang mencerminkan kebijakan pro terhadap penduduk miskin. Program pengentasan kemiskinan ini dimulai sejak era pemerintahan Orde Baru. Program-program tersebut seperti meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Keluarga Berencana (KB), Keluarga Sejahtera (KS), pemberian makan tambahan untuk tingkat siswa Sekolah Dasar, Transmigrasi, peningkatan UMP, Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dari program-program tersebut beberapa diataranya merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan *World Bank* terutama yang berkaitan dengan krisis ekonomi.

Penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program salah satunya pembentukan Lembaga Penanggulangan Kemiskinan melalui program PNPM-Mandiri. PNPM-Mandiri merupakan program

penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Program ini dimulai pada tahun 2007. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses penanggulangan kemiskinan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk melihat sukses atau tidaknya program tersebut.

Program PNPM-Mandiri semakin dikuatkan oleh payung hukum dengan dikeluarkanya Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada peraturan tersebut ada tiga kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagai instrumen program percepatan penanggulangan kemiskinan nasional. Salah satu program yang disebutkan adalah PNPM-Mandiri. PNPM-Mandiri sendiri memiliki 2 kluster dengan 12 program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM daerah tertinggal dan khusus (berakhir tahun 2012), RIS PNPM, PUAP, PNPM Kelautan dan Perikanan, PNPM Pariwisata, PNPM Generasi, PNPM *Green Development* Kecamatan Program, PNPM *Neighbourhood Development*, serta PNPM Perumahan dan Pemukiman.

Salah satu dari 12 program tersebut adalah PNPM-Mandiri Perkotaan. Program ini merupakan penyempurnaan dari Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP yang di bentuk sejak tahun 1999). P2KP merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat sehingga dapat

terbangun “Gerakan Kemandirian Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Berkelanjutan” yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip universal. Tingginya angka kemiskinan wilayah kota yang di tandai dengan kurangnya akses sarana prasarana lingkungan yang memadai, dan kualitas perumahan dan mata pencaharian yang tidak menentu merupakan latar belakang pembentukan P2KP (P2KP, 2005).

Pemberdayaan masyarakat melalui P2KP dilakukan dengan membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menjadi motor penggerak penanggulangan kemiskinan yang mana anggotanya merupakan masyarakat pada wilayah tersebut dan merupakan kepemimpinan kolektif. Untuk mencapai tujuannya anggota dipilih berdasarkan asas kemanusiaan. Misi dari pembentukan BKM adalah membangun modal sosial dengan nilai kemanusiaan. Badan Keswadayaan Masyarakat dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, karena selama ini sebagian besar penanggulangan kemiskinan yang ada didominasi oleh pihak luar sehingga masyarakat hanya menjadi objek saja tidak terlibat dan hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi lemah. Dengan adanya BKM ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak untuk menumbuhkan kembali gerakan kebersamaan.

Dalam mencapai tujuannya BKM memiliki 3 unit yaitu Unit Pengelola Keuangan, Unit Pengelola Sosial dan Unit Pengelola Lingkungan. Setiap unit pengelola memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kegiatan yang telah di sepakati bersama. Salah satu BKM yang dibentuk

adalah BKM Ngudi Makmur yang berada di Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Pada BKM Ngudi Makmur kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan adalah pinjaman bergulir yang diberikan kepada masyarakat yang membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sedangkan untuk Unit Pengelola Sosial kegiatan yang pelaksanakan seperti pelatihan keterampilan, pemberian beasiswa, pemberian sembako untuk orang jompo. Unit Pengelola Lingkungan lebih menekankan kepada pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti fasilitas masyarakat (balai, gedung PAUD, jalan, dan lain-lain).

Sesuai dengan data yang didapatkan dari BKM Ngudi Makmur Desa Semanu, hingga saat ini realisasi pinjaman yang di kelola oleh Unit Pengelola Keuangan dengan kegiatan pinjaman bergulir sebesar Rp 745.994.029,00 dengan jumlah penerima manfaat pinjaman bergulir sebesar 921 anggota yang terbentuk menjadi 131 KSM. Kegiatan pinjaman bergulir tersebut telah berjalan hingga 15 tahun dan setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah pinjaman yang mampu digulirkan kepada masyarakat. Dilihat dari banyaknya dana yang dikelola dan jumlah penerima manfaat kegiatan tersebut mampu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan khususnya warga Desa Semanu. Sedangkan Unit Pengelola Sosial telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk 121 warga miskin. Kegiatan tersebut mampu menciptakan lapangan usaha baru bagi masyarakat.

Sayangnya dari awal pelaksanaannya hingga sekarang belum diketahui kinerja Unit Pengelola Keuangan dalam pengelolaan pinjaman bergulir dan Unit Pengelola Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan, khususnya kinerja program yang dilihat dari tahap perencanaan hingga dampak kegiatan bagi masyarakat. Penilaian kinerja sangat di perlukan untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan. Dengan mengetahui kinerja UPK dan UPS dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan, hambatan, dan manfaatnya bagi masyarakat sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan mengenai pentingnya kinerja BKM, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat khususnya yang berada di Kelurahan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Analisis Kinerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Sosial (UPS) dalam Penanggulangan Kemiskinan pada BKM Ngudi Makmur Desa Semanu Kecamatan Semanu Gunungkidul”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Indeks gini Indonesia dari tahun ke tahun trendnya mengalami kenaikan.
2. Tingkat konsumsi masyarakat golongan bawah yang rendah.

3. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.
4. Belum diketahuinya kesesuaian penerima dana bergulir UPK dan pelatihan kewirausahaan UPS dengan kriteria kemiskinan dan kriteria penerima pinjaman.
5. Belum diketahuinya kinerja Unit Pengelola BKM Ngudi Makmur dalam pelaksanaan kegiatan dari awal berdiri hingga sekarang.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan masalah mengingat keterbatasan kemampuan, biaya dan waktu maka pemabatasan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian penerima dana bergulir UPK BKM Ngudi Makmur dan pelatihan kewirausahaan UPS BKM Ngudi Makmur dengan kriteria kemiskinan BPS dan kriteria penerima pinjaman bergulir.
2. Kinerja Unit Pengelola Keuangan BKM Ngudi Makmur dalam pengelolaan kegiatan pinjaman bergulir.
3. Kinerja Unit Pengelola Sosial BKM Ngudi Makmur dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian kriteria penerima pinjaman bergulir UPK BKM Ngudi Makmur dengan kriteria warga miskin yang ditetapkan BPS ?

2. Bagaimana kesesuaian kriteria peserta pelatihan kewirausahaan UPS BKM Ngudi Makmur dengan kriteria warga miskin yang ditetapkan BPS ?
3. Bagaimana kinerja UPK BKM Ngudi Makmur dalam pengelolaan pinjaman bergulir?
4. Bagaimana kinerja UPS BKM Ngudi Makmur dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kesesuaian penerima pinjaman bergulir UPK BKM Ngudi Makmur dengan kriteria kemiskinan BPS.
2. Kesesuaian peserta pelatihan kewirausahaan UPS BKM Ngudi Makmur dengan kriteria kemiskinan BPS.
3. Kinerja UPK BKM Ngudi Makmur Desa Semanu dalam pengelolaan pinjaman bergulir.
4. Kinerja UPS BKM Ngudi Makmur Desa Semanu dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapakan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis
 - a. Menjadi referensi untuk penelitian yang sejenis.

b. Menambah pengetahuan mengenai kajian ekonomi khususnya ekonomi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

2. Praktis

- a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta penelitian ini dapat digunakan untuk menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang sejenis.
- b. Bagi pemerintah untuk mengetahui efektivitas program penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan yang telah dilaksanakan sekaligus dapat digunakan untuk evaluasi keberhasilan program.
- c. Bagi BKM Ngudi Makmur Desa Semanu untuk refleksi penilaian keberhasilan program dan pertimbangan perbaikan program agar menjadi lebih baik.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Kemiskinan

a. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu lagi memenuhi kesejahteraan ekonominya. Kesejahteraan ekonomi dianggap sebagai kebutuhan dasar dari suatu standar hidup minimal yang dapat diukur dari kecukupan sandang, pangan, dan papan. Selain ketiga kebutuhan tersebut standar minimal untuk hidup layak juga dilihat dari kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dalam pengertian kemiskinan ini BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia.

Todaro (2003: 230) membagi kemiskinan menjadi 2 yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup dibawah tingkat pendapatan rill minumum tertentu atau di bawah garis kemiskinan dunia.

Kebutuhan dasar yang di maksud adalah tingkat kebutuhan minimum berupa kecukupan makanan, pakaian, serta perumahan sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Kemiskinan absolut ini diukur menggunakan angka yang disebut dengan *headcount index* (indeks per kepala).

Dengan demikian pengertian kemiskinan absolut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum agar manusia dapat hidup secara layak. Kemiskinan pada konsep ini diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat dari ketimpangan sosial, yaitu ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan minimalnya akantetapi masih jauh lebih rendah di bandingkan dengan orang-oarang yang ada disekelilingnya. Hal inilah yang kemudian melahirkan sebuah ketimpangan. Semakin besar ketimpangan yang terjadi antar anggota masyarakat semakin besar pula tingkat kemiskinan yang terjadi pada masyarakat tersebut. Menurut Todaro (2003:235), ketimpangan pendapatan yang ekstrem ini akan menyebabkan inefisiensi ekonomi dan alokasi aset yang tidak efisien.

b. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Todaro (2003:61), tinggi rendahnya tingkat kemiskinan suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar atau sempitnya distribusi pendapatan. Dari dua faktor tersebut jelas terlihat bahwa walaupun suatu negara memiliki tingkat pendapatan nasional rata-rata tinggi akan tetapi tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata maka dapat dipastikan tingkat kemiskinan yang terjadi pada negara tersebut juga tinggi sejalan dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi.

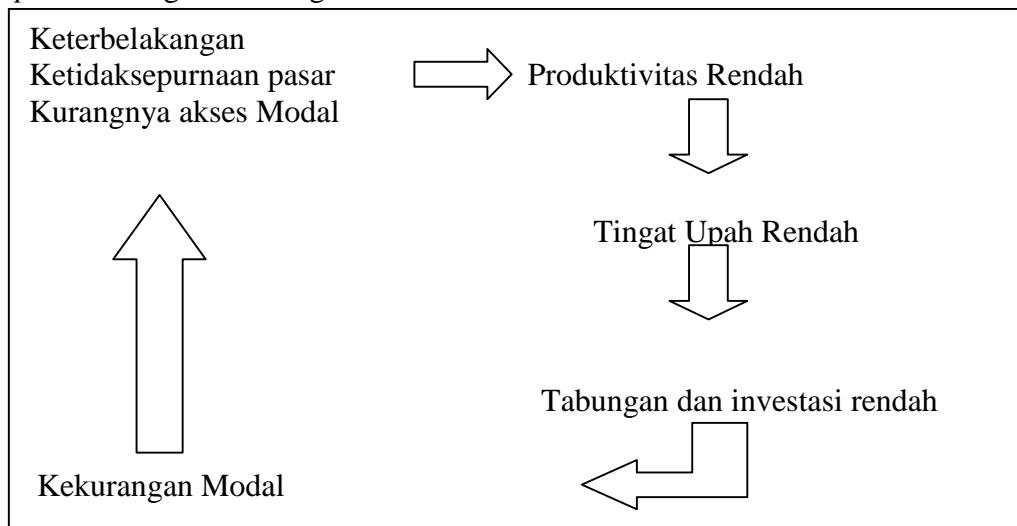
Selain dua faktor utama yang dikemukakan Todaro, Sharp dalam Mudrajat Kuncoro (2004) mengidentifikasi 3 penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi.

- 1) Dilihat secara mikro, bahwa kemiskinan terjadi karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan distribusi pendapatan tidak merata. Penduduk miskin memiliki sumber daya yang sedikit dengan kualitas yang rendah.
- 2) Kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menyebabkan produktivitas rendah yang berujung pada rendahnya upah yang diterima. Penyebab dari adanya produktivitas rendah ini adalah tingkat pendidikan yang rendah, nasib yang tidak beruntung atau diskriminasi.

3) Kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan akses modal.

Ketiga penyebab kemiskinan yang tersebut kemudian membentuk sebuah teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*)

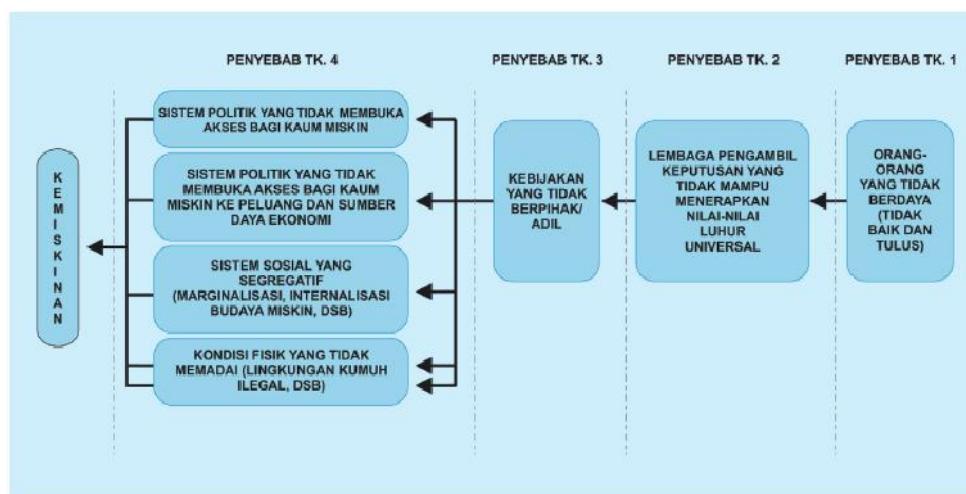
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia, keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar kurangnya akses terhadap modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas menyebabkan pendapatan yang diterima oleh pekerja rendah. Pendapatan yang rendah akan bermuara pada rendahnya investasi dan tabungan. Rendahnya investasi dan tabungan akan menyebabkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia karena pendidikan yang ditempuh juga rendah dan begitulah seterusnya sehingga membentuk sebuah lingakaran yang tidak berujung (Gambar 1). Teori lingkaran setan kemiskinan ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953. Ekonom ini juga mengatakan bahwa “*a poor country is poor because is poor*”. Yang berarti negara miskin itu miskin karena dia miskin.



Gambar 1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Sumber: Ragnar Nurkse (dalam Mudrajat Kuncoro, 2004)

Selain faktor penyebab kemiskinan di atas menurut PNPM Mandiri Perkotaan melalui Kementerian Pekerjaan Umum (2012: 8) kemiskinan adalah akibat dari akar penyebab kemiskinan yang sebenarnya yaitu kondisi masyarakat, utamanya para pemimpin yang belum berdaya sehingga tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Akar Penyebab Kemiskinan Menurut PNPM Mandiri Perkotaan

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2012)

Dari gambar 2 tersebut kemiskinan di sebabkan oleh masyarakat yang berlum berdaya hal ini akan menciptakan lemahnya modal sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan, dll). Kondisi modal sosial yang melemah serta memudar ini disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemerintah yang cederung tidak adil, tidak transparan, dan tidak tanggung jawab. Akibatnya menimbulkan kecurigaan

masyarakat. Keputusan salah yang diambil oleh lembaga kepemimpinan masyarakat ini awalnya disebabkan karena lembaga tersebut dikelola oleh orang-orang yang tidak berdaya dan tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur. Kebijakan yang tidak adil ini kemudian memunculkan masalah baru seperti sistem politik yang tidak membuka akses bagi kaum miskin baik dalam kegiatan politik maupun dalam peluang penguasaan sumber daya ekonomi, sistem sosial yang segregatif (*marginalisasi* dan *internalisasi* budaya miskin), dan kondisi fisik yang tidak memadai. Masalah-masalah tersebut kemudian saling mempengaruhi dan terciptalah kemiskinan dalam masyarakat.

Pemahaman mengenai akar penyebab kemiskinan seperti diatas telah menyadarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu kearah perubahan perilaku/ sikap dan cara pandang masyarakat utamanya para pemimpin untuk senantiasa mengambil keputusan dan bertindak berlandaskan pada nilai-nilai luhur universal, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (Kementerian PU, 2012: 8)

c. Indikator Kemiskinan

Pada umumnya indikator kemiskinan yang digunakan di Indonesia menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut sesuai dengan indikator kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Mudrajat Kuncoro (2004:142),

Batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh setiap negara berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan makan minum dan bukan makan. Untuk kebutuhan minuman makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makan meliputi perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Dengan demikian pendekatan kemiskinan yang digunakan BPS ada 2 seperti yang dikemukakan Mudrajat Kuncoro (2004: 142):

- 1) *Basic Needs Approach*, dalam pendekatan ini kemiskinan di konseptualkan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- 2) *Head Count Index*, menggunakan ukuran kemiskinan absolut.

Dari pendekatan kemiskinan yang digunakan oleh BPS tersebut, kemudian BPS membuat 14 kriteria penduduk dikatakan miskin :

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester.

- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non

kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika dipenuhi minimal 9 dari 14 kriteria kemiskinan menurut BPS, maka rumah tangga tersebut di kategorikan sebagai rumah tangga miskin (Bappenas, 2010: 14)

d. Upaya Pengendalian Kemiskinan

Pentingnya peran program pengentasan kemiskinan sudah di sadari sejak masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru menekankan penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Program pemerintah yang di laksanakan pada masa Orde Baru diantaranya program pemerintah yang mendukung pembangunan usaha mikro , kecil, dan menengah (UMKM) dan Koperasi, Inpres Desa Tertinggal (IDT), Keluarga Berencana (KB), Keluarga Sejahtera (KS), pemberian makan tambahan untuk anak sekolah, Transmigrasi, Upah Minimum Regional (UMR), dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) (Tambunan, 2012:197)

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan baik yang disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional, budaya, maupun sosial masyarakat pemerintah kemudian membuat upaya pengendalian kemiskinan nasional. Program tersebut dilaksanakan oleh Tim Nasional Percepatan Pengendalian Kemiskinan(TNP2K). Kegiatan yang dilakukan oleh TNP2K sendiri meliputi program pemberian bantuan langsung, program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, serta program penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan dan pembinaan usaha

kecil. Untuk meningkatkan peran dan efektifitas TNP2K pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menetapkan target pengurangan kemiskinan nasional sebesar 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014.

Menurut TNP2K (2014), terdapat empat strategi dasar yang ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu:

- 1) Menyempurnakan program perlindungan sosial
- 2) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
- 3) Pemberdayaan masyarakat
- 4) Pembangunan yang inklusif

Dari empat strategi tersebut kemudian pemerintah membuat instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi menjadi tiga kluster, yaitu :

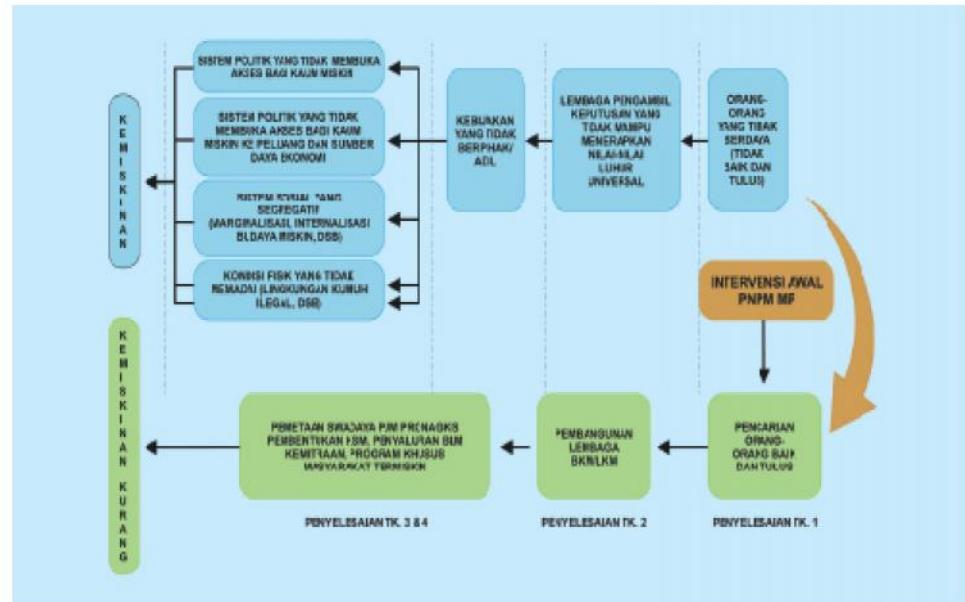
- 1) Kluster I, program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
- 2) Kluster II, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kluster III, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Salah satu strategi dari penanggulangan kemiskinan menurut TNP2K adalah pemberdayaan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri. Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan terus

menerus menumbuh kembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Proses pembelajaran di tingkat masyarakat ini berlangsung selama program atau pasca program oleh masyarakat sendiri dengan membangun dan melembagakan Komunitas Belajar Kelurahan (Kementerian PU, 2012: 9)

Melihat pentingnya program pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP). PNPM-MP menitikberatkan pada upaya penguatan masyarakat melalui nilai-nilai agar tercipta masyarakat yang mampu menjadi motor penggerak dalam melembagakan kembali nilai-nilai luhur yang universal. Nilai-nilai luhur tersebut seperti gerakan tata kepemimpinan yang baik dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan lembaga masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang masih berada pada kategori miskin sehingga dapat tercipta lingkungan perkotaan dengan perumahan yang layak huni dan masyarakatnya menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penanggulangan kemiskinan menurut PNPM Mandiri Perkotaan terhadap akar penyebab kemiskinan dapat dilihat pada gambar 3



Gambar 3. Penanggulangan Kemiskinan oleh Masyarakat melalui

PNPM-MP

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2012)

Dari gambar 3, penanggulangan kemiskinan menurut PNPM-MP dimulai dengan pencarian orang yang baik secara tulus yang artinya orang tersebut memiliki niat baik untuk membantu dan memberdayakan masyarakat tanpa pamrih. Orang-orang ini yang kemudian akan bergabung dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM selanjutnya akan melakukan pemetaan swadaya mengenai program-program yang hendak dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), menyalurkan BLM, dan program-program kemiskinan lainnya. Melalui BKM inilah diharapkan akar penyebab kemiskinan dapat di hilangkan.

2. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai 1). Sesuatu hal yang dicapai, 2). Prestasi yang diperhatikan, 3). Kemampuan kerja. Menurut Moheriono (2012: 95), Kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan suatu pelaksanaan program. Pelaksanaan program tersebut dapat diukur atau dinilai apabila telah ditetapkan tujuan dan target.

Robbins dalam Moheriono (2012: 96) mengatakan bahwa kinerja adalah interaksi antara kemampuan atau *ability* (A), motivasi (M), dan kesempatan atau *opportunity* (O). Sehingga dapat dibuat fungsi dari kinerja yaitu $\text{Kinerja} = f(A \times M \times O)$. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kinerja sebuah organisasi akan berjalan maksimal apabila terdapat kemampuan yang baik dalam mengelola, motivasi yang tinggi dari pengelola dan tentunya mampu menggunakan segala peluang untuk mencapai keberhasilan.

Mahsun (2006: 25) mengemukakan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu program, kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Kinerja sektor publik

meliputi kinerja individu, kinerja kelompok dan kinerja organisasi. Dimana untuk mencapai tujuanya diperlukan keseimbangan antara ketiga kelompok tersebut.

Sejalan dengan berkembangnya modernisasi sistem manajemen kinerja tidak hanya digunakan untuk menilai sisi personal (individu) atau orgaisasi. Kinerja juga dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu program. Penilaian kinerja suatu program atau kebijakan ini dinamakan dengan Kinerja Program/Kebijakan. Menurut Moheriono (2012: 69) penilaian kinerja suatu program/kebijakan adalah menilai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program tersebut dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut.

Dalam menilai suatu kinerja ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Persyaratan tersebut menentukan hasil penilaian kinerja selanjutnya. Menurut Moheriono (2012: 106) syarat yang diperlukan dalam penilaian kinerja adalah *input* (potensi) yang mencakup mengenai penetapan aspek-aspek yang akan dinilai, *procces* (pelaksanaan), dan *output* (hasil) yang mencakup kejelasan hasil penilaian kinerja seperti manfaat, dampak, dan resiko, serta tindak lanjut rekomendasi penilaian.

b. Indikator Kinerja

Banyak definisi mengenai pengertian Indikator kinerja atau *performance indicator*. Moheriono (2012: 108) menuturkan beberapa pengertian dari indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Nilai atau karakteristik tertentu yang dipergunakan untuk mengukur *outcome/outupt* suatu kegiatan.
- 2) Sebagai alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya.
- 3) Sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan organisasi.
- 4) Suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

Dari keempat pengetian tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur suatu hal apakah sesuai dengan tujuan dan sasaran atau tidak.

Syarat ideal yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu indikator menurut Moehleriono (2012: 111-112) adalah :

- 1) *Consistency*, artinya indikator harus konsisten dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu
- 2) *Comparability*, indikator harus mempunyai daya banding yang tepat.
- 3) *Clarity*, indikator harus sederhana, jelas, dan mudah dimengerti.

- 4) *Controllability*, harus berdasar pada wilayah yang dikendalikan
- 5) *Contingency*, bukan merupakan variable yang independen.
- 6) *Comprehensiveness*, merefleksikan semua aspek perilaku yang penting untuk membuat keputusan.
- 7) *Boundedness*, difokuskan pada faktor-faktor utama,
- 8) *Relevance*, sesuai dengan kebutuhan tertentu.
- 9) *Feasibility*, target yang ditetapkan merupakan harapan realistik dan dapat dicapai.

Indikator terdiri dari angka dan satuan tertentu yang hendak dicapai. Angka-angka yang digunakan dalam indikator tersebut menghasilkan jenis-jenis indikator. Menurut Moeheriono (2012: 112) jenis-jenis indikator dibagi menjadi:

- 1) Indikator Kualitatif

Indikator ini menggantikan angka dengan menggunakan bentuk kualitatif. Nilai yang diberikan berupa kelompok derajat kuantitatif yang berurutan dalam entuk rentang skala.

- 2) Indikator Kuantitatif Absolut

Menggunakan angka bilangan positif, nol dan negatif termasuk dalam bentuk pecahan desimal.

- 3) Indikator Persentase

Menggunakan perbandingan atau proporsi angka absolut dari suatu yang akan diukur dengan total populasinya. Persentase umumnya berupa angka positif termasuk dalam bentuk pecahan desimal.

4) Indikator Rasio

Menggunakan perbandingan absolut dan suatu yang akan diukur dengan angka absolut lainnya.

5) Indikator Rata-Rata

Menggunakan bentuk rata-rata angka dari sejumlah kejadian atau populasi.

6) Indikator Indeks

Menggunakan gabungan angka-angka indikator lainnya yang dihimpun melalui suatu formula maupun pembobotan pada masing-masing variabelnya.

Selain itu hal yang perlu dilakukan dalam pembuatan kinerja adalah penetapan indikator kinerja. Menurut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara atau AKIP-LAN (2008: 106) penetapan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Penetapan indikator kinerja harus realistik dan rasional dengan memperhatikan tujuan dan sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud hendaknya spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan tidak bias.

Indikator kinerja yang ditetapkan tersebut kemudian dikategorikan menurut apa yang akan diukur. Indikator kinerja kegiatan/ program menurut AKIP-LAN (2008: 106-107) adalah :

1) Masukan (*input*)

Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.

2) Keluaran (*Output*)

Adalah segala sesuatu berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

3) Hasil (*Outcome*)

Mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan ukuran sejauh mana produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4) Manfaat (*Benefit*)

Adalah kegunaan suatu keluaran yang dirakasakan langsung oleh masyarakat.

5) Dampak (*Impact*)

Tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dicapai.

Indikator-indikator tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat melihat bagaimana pencapaian suatu sasaran dan tujuan.

Selain indikator kinerja yang diungkapkan oleh AKIP-LAN. Mahsun(2006: 31) membagi indikator kinerja menjadi :

- 1) Indikator Masukan (input)
- 2) Indikator proses (procces)
- 3) Indikator keluaran (output)
- 4) Indikator hasil (outcome)
- 5) Indikator manfaat (Benefit)
- 6) Indikator dampak (Impact)

c. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja menurut Moheriono (2012: 73) menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu, dan setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Bagi instansi pemerintah yang bersangkutan, evaluasi dilakukan dengan merujuk kepada indikator kinerja (*Input, process, output, outcome, benefit, dan impact*) Secara rinci manfaat dari evaluasi kinerja adalah :

- 1) Perbaikan perencanaan, strategi, dan kebijakan.
- 2) Pengambilan keputusan
- 3) Pengendalian program/kegiatan
- 4) Perbaikan *input, proses, dan output, perbaikan tatanan/sistem prosedur.*

Dilihat dari tahapnya proses evaluasi kinerja dilaksanakan setelah dibentuknya suatu indikator pengukuran kinerja. Cakupan dari evaluasi kinerja yang dilakukan menurut Moehleriono (2012: 74) meliputi:

- 1) Evaluasi Kinerja Kegiatan
- 2) Evaluasi Kinerja Program
- 3) Evaluasi Kinerja Kebijakan

Setelah dilakukan evaluasi mengenai kinerja suatu kegiatan kemudian dilakukan pelaporan dari hasil evaluasi. Laporan tersebut berisi informasi mengenai pertanggung jawaban kegiatan pelaksanaan kegiatan. Dalam laporan ini harus termuat profil kegiatan, perencanaan strategis, kinerja, dan evaluasi kinerja.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah suatu kegiatan pengukuran yang digunakan untuk menilai suatu kinerja. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan berbagai proses. Evaluasi juga bermanfaat untuk melihat hambatan suatu kegiatan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Permendagri No 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat pasal 1 ayat 8 adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam berbangsa dan

bernegara. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat memerlukan peran aktif dari masyarakat agar pemberdayaan tersebut mencapai suatu keberhasilan.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (2003: 01) Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai suksesnya pembangunan nasional. Meski demikian pemberdayaan masyarakat tidak selamanya memiliki arti sebagai konsep ekonomi. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya adalah memandirikan masyarakat dalam segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, dan politik. Masyarakat adalah pelaku utama dalam sebuah pembangunan. Masyarakat nantinya yang akan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembangunan yang berlangsung baik pemabangunan dalam arti ekonomi, sosial, budaya ataupun politik.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pemabangunan juga ditegaskan dalam Undang-Undang No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan

organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat, atau dari kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah. Dari konsep mengenai pemberdayaan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya baik dalam kehidupan social, ekonomi, budaya maupun politik.

b. Tujuan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam mencapai pemberdayaan masyarakat tersebut diperlukan sebuah strategi salah satunya adalah startegi pemabangunan seperti yang dikemukakan oleh Usman (1998: 40). Strategi pemabangunan sering digunakan oleh negara berkemabang. Strategi tersebut adalah :

- 1) Pembangunan pertanian (*agricultural development*)
- 2) Industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*)
- 3) Pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*)
- 4) Strategi pusat pembangunan (*groweth center strategy*)

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mampu memandirikan masyarakat khususnya masyarakat miskin yang memiliki akses terbatas terhadap pembangunan. Dalam mencapai tujuan tersebut hal yang paling penting dilakukan adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat secara aktif. Menurut Moeljarto (1995: 48) ada beberapa alasan mengapa partisipasi masyarakat dianggap penting :

- 1) Masyarakat adalah fokus utama dan tujuan akhir pemabangunan.
- 2) Partisipasi menimbulkan harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat.
- 3) Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi.
- 4) Partisipasi memperluas kawasan penerimaan proyek pemabangunan.
- 5) Menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
- 6) Pencerminan hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pemabangunan mereka sendiri.
- 7) Cara efektif membangun kemampuan masyarakat mengelola program pemabangunan yang khas daerah.

Selain membutuhkan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat juga diperlukan sebuah pendampingan. Pendampingan tersebut dapat dilakukan oleh individu/lembaga yang menjalin relasi

sosial dengan masyarakat untuk memberikan dukungan, motivasi, fasilitas, dan menjembebatani kebutuhan pemberdayaan masyarakat. Mengenai pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat telah ditetapkan dalam Permendagri No 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat pasal 1 ayat 16 dan 17.

4. PNPM Mandiri Perkotaan

a. Pengertian PNPM Mandiri Perkotaan

Dasar hukum dari Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perkotaan (PNPM) Perkotaan adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Program yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan mengadopsi program penanggulangan kemiskinan yang sebelumnya telah dilaksanakan yaitu P2KP atau Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Dikutip dari Pedoman Umum Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan mengenai P2KP yang di terbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (2012: 6)

“Program ini dilakanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (sosial capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat.“

Pada tahun 2007 P2KP diadopsi untuk menjadi bagian dari PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini kemudian diarahakan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs) yaitu mengurangi kemiskinan sebesar 50% di tahun 2015. PNPM Mandiri Perkotaan P2KP telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dari 11 ribu BKM/LKM yang tersebar di sekitar 1.153 kecamatan di 268 kota/kabupaten telah memunculkan lebih dari 600 ribu relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 juta orang pemanfaat program yang merupakan penduduk miskin melalui 860 Kelompok Swadaya Masyarakat (Kementerian PU, 2012: 6).

Orientasi pembangunan yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan adalah dengan membangun pondasi masyarakat berdaya dengan kegiatan intervensi pada perubahan sikap/perilaku/cara padang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahapan selanjutnya berorientasi untuk membangun transformasi menuju masyarakat madani melalui pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli setempatuntuk mengakses peluang dan sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan intervensi di lokasi padat, kumuh, dan termiskin dengan kegiatan khusus (Kementerian PU, 2012: 6-8)

b. Tujuan dan Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan

Tujuan dibentuknya PNPM Mandiri Perkotaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM yaitu Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Secara khusus tujuan PNPM MP adalah Membantu masyarakat miskin perkotaan di kelurahan/desa peserta program mendapat manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan dan tata kepemerintahan yang baik (Kementerian PU,2012:14).

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya diperlukan partisipasi aktif masyarakat khususnya masyarakat miskin, baik saat perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan. Hal ini diperlukan agar program tersebut dapat tepat sasaran dan dapat berlanjut sebagai program pemberdayaan masyarakat. Selain peran aktif masyarakat kerjasama antara masyarakat dan lembaga pemerintahan juga diperlukan agar terbentuk sebuah keputusan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sasaran dari PNPM Mandiri Perkotaan untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat adalah :

- 1) Memperkuat dan melembagakan BKM/LKM yang dipercaya, aspiratif, representatif dan bertanggung jawab untuk mendorong tumbuh dan kembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat.

- 2) Tersedianya Perencanaan Jangka menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) di tingkat kelurahan/desa sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan.
- 3) Terwujudnya pemanfaatan BLM, termasuk sumber dana lain, yang tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 4) Terbangunya forum BKM/LKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah.
- 5) Menigkatkan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bermitra dengan BKM/LKM dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin.
- 6) Terwujudnya pendampingan teknis dan kontribusi pendanaan sesuai dengan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah (IFKD) dari pemerintah kota/kabupaten dalam PNPM MP serta terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan.
- 7) Terwujudnya kemitraan antara BKM/LKM dengan berbagai pemangku kepentingan.

- 8) Masyarakat yang sadar, peduli, dan mampu melaksanakan rangkaian kegiatan PNPM MP di wilayah secara mandiri dan berkelanjutan sesuai substansi pedoman pelaksanaan PNPM MP.
- 9) Relawan dan Relawan khusus (berdasarkan minat) sebagai penggerak proses pembangunan partisipatif di wilayah dan forum pemantauan partisipasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan PJM Pronangkis.
- 10) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam penataan lingkungan pemukiman yang lebih komprehensif, pengelolan resiko bencana dan pengembangan tata penghidupan masyarakat.

Sedangkan untuk lokasi sarsaran program PNPM Mandiri Perkotaan adalah lokasi yang ditetapkan oleh TNP2K sebagai lokasi yang akan menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Kelompok penerima BLM sendiri dibagi menjadi 3 :

- 1) Masyarakat, adalah masyarakat desa/kelurahan peserta PNPM MP khususnya masyarakat miskin.
- 2) Pemerintah Propinsi, Kota/Kabupaten, adalah semua perangkat pemerintahan Provinsi, Kota/ kabupaten yang wilayahnya adalah peserta PNPM MP.

3) Pemangku kepentingan terkait meliputi kelompok peduli penanggulangan kemiskinan.

Akan tetapi dari ketiga penerima BLM tersebut penerima manfaat langsung dari dana BLM PNPM MP adalah keluarga miskin yang ditetapkan berdasarkan musyawarah warga, refleksi kemiskinan, dan pemetaan swadaya.

5. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

a. Pengertian BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah lembaga kepemimpinan masyarakat yang bertugas untuk memimpin gerakan penanggulangan kemiskinan. BKM sebenarnya bukan sebuah organisasi akan tetapi kesepakatan bersama dari masyarakat untuk bersatu sebagai sesama masyarakat di suatu keluarahan/desa untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Semua pihak yang tergabung dalam ini tidak boleh bertindak secara parsial, tidak mewakili golongan tertentu dan juga tidak mewakili wilayah tertentu yang bersifat impartial (Kementerian PU, 2012: 40).

Untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga kepemimpinan pengentasan kemiskinan, tidak berarti harus terbentuk sebuah lembaga baru akan tetapi bisa mengoptimalkan dan memfungsikan lembaga yang telah ada sebelumnya. Lembaga yang ada tersebut harus memenuhi kriteria pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat sebagimana yang tercantum

dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2012: 39-40) sebagai-berikut :

- 1) Bukan lembaga yang dibentuk secara otomatis karena perundangan atau peraturan pemerintah sebagai alat kelengkapan lembaga pemerintah, tetapi lembaga yang prakarsa pembentukan maupun pengelolaanya ditentukan masyarakat.
- 2) Kekuasaan/kewenangan dan legitimasi bersumber dari warga masyarakat setempat.
- 3) Berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif dan oleh karenanya juga berperan sebagai representasi warga yang berhimpun dalam suatu himpunan masyarakat warga setempat yang bersifat organisasi anggota atau bertumpu pada anggota, artinya keputusan tertinggi berada ditangan anggota.
- 4) Melakukan proses pengambilan keputusan secara kolektif, demokratis dan partisipatif.
- 5) Diterima, berfungsi dan berakar di seluruh lapisan masyarakat setempat (inklusif dan imparsial)
- 6) Mekanisme pemilihan anggota BKM/LKM melalui proses pemilihan secara langsung oleh warga, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun.
- 7) Kriteria keanggotaan BKM/LKM pada dasarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan.

- 8) Dibentuk secara partisipatif, demokratis dan inklusif.
- 9) Bekerja secara kolektif, transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel.
- 10) Mampu mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, politik, militer, agama, usaha, dan keluarga.

Tujuan dari dibentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat secara umum adalah merumuskan, melaksanakan, dan memonitoring kebijakan dan aturan main secara demokratis sesuai dengan aspirasi warga mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga kelurahan/desa setempat, termasuk penggunaan dana BLM. Selain itu BKM juga bertugas menghidupkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya BKM berkewajiban memberikan fasilitas untuk menyalurkan aspirasi warga agar terbentuk transparansi masyarakat khususnya, dan pihak luar pada umumnya. Badan Keswadayaan Masyarakat bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pengembangan kelurahan pada umumnya.

Selain pembentukan BKM untuk menjalankan PNPM Mandiri Perkotaan juga di bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM ini adalah kelompok masyarakat pengguna/ pemanfaat dana BLM PNPM MP. KSM di organisasi oleh tim relawan dan dibantu oleh fasilitator. KSM tidak hanya sebagai pemanfaat pasif akan tetapi pelaksana kegiatan terkait dengan

penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai BKM melalui berbagai dana yang mampu di galang (Kementerian PU, 2012: 81-82).

Dalam menjalankan kegiatanya BKM di bagi menjadi 3 Unit Pengelola (UP). Ketiga unit tersebut adalah ;

- 1) Unit Pengelola Lingkungan, kegiatan yang dilakukan oleh UPL ini adalah investasi infrastruktur yang dapat memberikan manfaat baik secara kolektif maupun individu dalam masyarakat. Investasi infrastruktur yang dilakukan adalah membangun fasilitas publik yang mampu mendorong kersejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, sarana kegiatan masyarakat seperti balai warga, tempat pendidikan anak, dan tempat ibadah. Kegiatan yang dilakukan oleh UPL ini merupakan kegiatan skala besar yaitu kegiatan yang sudah ditemukan pada saat Pemetaan Swadaya.
- 2) Unit Pengelola Sosial, kegiatan yang dilakukan oleh UPS adalah kegiatan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja bagi warga miskin. Selain kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan lapangan kerja UPS dapat melaksanakan kegiatan sosial berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan warga dan kebijakan yang telah dibuat.
- 3) Unit Pengelola Keuangan, kegiatan yang dilakukan oleh UPK adalah kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan warga miskin. Dalam hal ini warga miskin dianggap kurang

memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh UPK untuk meningkatkan taraf ekonomi warga miskin adalah pemberian pinjaman bergulir yang khususnya digunakan untuk mengembangkan usaha kecil.

b. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Penangulangan kemiskinan untuk wilayah perkotaan atau lebih dikenal dengan P2KP telah dimulai sejak tahun 1999. Penanggulangan kemiskinan tersebut dimulai dengan tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial, dan ekonomi atau dikenal dengan Tridaya. Untuk bidang ekonomi diwujudkan dengan pinjaman bergulir. Menurut Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir yang di keluarkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan (2012: 1), pinjaman bergulir adalah pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan/desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan .

Sebelumnya, pelaksanaan pinjaman bergulir sudah pernah dilakukan dengan program pinjaman bergulir P2KP-1, P2KP-2, dan P2KP-3 akan tetapi di ketahui kinerjanya masih buruk. Hal ini di karenakan kurangnya panduan operasional baik dari fasilitator maupun pemerintah. Dengan adanya kegagalan dan keberhasilan pemberian pinjaman bergulir tersebut maka kegiatan tersebut dilanjutkan kembali tentunya dengan berbagai perbaikan. Menurut Kementerian PU (2012: 2) ,

ada beragai pertimbangan dalam melanjutkan kegiatan pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, di antaranya:

- 1) Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin meningkatkan pendapatan dan kekayaan.
- 2) Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah. Sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapatkan akses jasa layanan keuangan formal. (Sumber Jhonson dan Hollach).
- 3) Pinjaman bergulir memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan.
- 4) Permintaan pinjaman bergulir pada rencana pembangunan masyarakat masih tinggi.
- 5) Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial yang ada di masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut kemudian pinjaman bergulir yang tadinya dilaksanakan pada program P2KP di lanjutkan kembali dalam PNPM Mandiri Perkotaan.

Kegitan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan

agar dapat meningkatkan pendapatnya. Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mikro sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin. Selain itu tujuan lainnya adalah membelajarkan masyarakat dalam mengelola keuangan khusnya pinjaman dalam penggunaanya secara benar.

Sasaran dari pelaksanaan program pinjaman bergulir tersebut adalah rumah tangga miskin dengan pendapatan rendah yang berada di wilayah kelurahan/ desa LKM/UPK. Indikator tercapainya sasaran tersebut menurut PNPM MP (2012: 3) adalah:

- 1) Pinjaman berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam daftar PS2.
- 2) Minimal 30% peminjam adalah perempuan.
- 3) Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam KSM khusus untuk kegiatan ini beranggotakan 5 orang.
- 4) Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembalianya baik terjamin keberlanjutanya baik melalui dana BLM maupun dana hasil *chanelling* dengan kebijakan pinjaman yang jelas.

Agar dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut didapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan dan secara efektif dapat mengurangi tingkat kemiskinan,maka ditetapkan ketentuan dalam pelaksanaan pinjaman

bergulir. Ketentuan dasar yang ditetapkan tersebut berkaitan dengan kriteria kelayakan lembaga pengelola, kelayakan peminjam, ketentuan umum (Skim Pinjaman Bergulir), sumber dana pinjaman bergulir, kelektibilitas pinjaman yang mencerminkan pengelolan pinjaman bergulir (Kementerian PU: 2012)

Sebelum kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan penilaian mengenai kelayakan lembaga pengelola. Kegiatan pinjaman bergulir tersebut dapat dilaksanakan hanya jika lembaga tersebut memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir. Selain lembaga pengelola fasilitator dan relawan setempat juga bertanggung jawab terhadap tercapainya kelayakan kelompok maupun anggota penerima pinjaman bergulir.

Pinjaman bergulir dapat diterima oleh masyarakat miskin hanya jika penduduk miskin tersebut tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Jika KSM dan anggotanya tidak memenuhi kelayakan sebagaimana kriteria yang ditetapkan maka KSM dan anggotanya tersebut tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan baik dari fasilitator maupun relawan agar KSM tersebut dapat memenuhi kriteria. Kriteria kelayakan KSM adalah :

- 1) KSM peminjam telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar P2.
- 2) KSM dibentuk tidak hanya untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

- 3) KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan.
- 4) Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh BKM/LKM/masyarakat.
- 5) Jumlah anggota minimal 5 orang
- 6) Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan.
- 7) Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan.
- 8) Semua anggota KSM menyetujui sistem tanggung renteng dan ditaungkan secara tertulis dalam Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng.
- 9) Semua anggota KSM telah memperoleh pelatihan tentang pinjman bergulir, Kewirausahaan, dan Pengelola Ekonomi Rumah Tangga(PERT) dari fasilitator dan LKM/UPK.
- 10) KSM dapat mengakses pinjaman bergulir apabila membentuk kelompok minimal 3 bulan berturut-turut memiliki kegiatan untuk menggalang tabungan kelompok.

Selain kriteria kelayakan KSM juga di sebutkan Skim Pinjman Bergulir atau Ketentuan Umum Pinjaman Bergulir. Peminjam dalam pinjman bergulir adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang telah memenuhi kriteria kelayakan KSM dan bukan perorangan. Selain itu setiap anggota KSM harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Warga miskin tercantum dalam PS2.
- 2) Mempunyai usaha atau akan memulai usaha.

- 3) Usahanya menguntungkan dan dapat dikembangkan.
- 4) Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha.
- 5) Memerlukan tambahan modal kerja.
- 6) Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjman.
- 7) Mendapat bersetujuan keluarga.
- 8) Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan, dan kesusilaan.

Jumlah pinjman yang diberikan bagi KSM/anggotanya untuk tahap pertama satu orang maksimal Rp 1.000.000,00 akan tetapi jumlah ini dapat disesuaikan dengan kemampuan membayar pinjaman. Selanjutnya untuk pinjaman tahap dua dan seterusnya disesuaikan dengan catatan pembayaran dan keampuan dana UPK. Besarnya jasa pinjaman yang diberikan adalah 1,5% perbulan yang dihitung dari pokok pinjman mula-mula. Jasa pinjman ditetapkan berdasarkan keputusan rapat LKM/BKM yang jumlahnya minimal harus dapat menutup semua biaya UPK (Biaya dana, operasional, resiko pinjman, memelihara modal awal dar inflasi, serta tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan digunakan untuk pemupukan modal, dana lingkungan, dana sosial dan lain-lain). Jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah 3-12 bulan disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam.

Tahapan pelaksanaan pinjaman bergulir adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pengajuan Pinjaman

Dalam tahap ini dilakukan KSM didampingi dengan fasilitator/relawan/petugas UPK. Kegiatan yang dilakukan adalah

mempersiapkan berkas-berkas pengajuan pinjaman. Berkas pinjaman yang dibutuhkan adalah :

- a) Berita acara pembentukan KSM
- b) Aturan main KSM
- c) Fotocopy KTP masing-masing anggota KSM
- d) Blanko pengajuan pinjaman anggota KSM yang sudah diisi
- e) Surat kuasa pencairan tabungan tanggung renteng

2. Tahap Pemeriksaan Pinjaman

Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman beserta lampirannya yang diterima dari ketua KSM. Apabila berkas-berkas tersebut telah lengkap terisi petugas menjelaskan ketentuan mengenai pinjaman bergulir. Petugas UPK selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan digunakan untuk mengetahui kelayakan anggota KSM.

3. Tahap Putusan Pinjaman

Pada tahapan ini manajer UPK melakukan penelitian pengajuan pinjaman KSM beserta usulan putusan dari petugas UPK. Apabila berkas pengajuan dan usulan dari petugas UPK tidak terdapat masalah maka usulan tersebut disetujui oleh manajer UPK.

4. Tahap Realisasi/Pencairan Pinjaman

Setelah berkas pinjaman tersebut diputuskan oleh manajer UPK, petugas UPK kemudian memberitahu KSM tentang putusan tersebut. Jika ditolak KSM diberi tahu beserta alasan penolakan. Jika diterima KSM diberi tahu mengenai perjanjian pinjaman dan angsurannya. Jika telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut maka UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman yang berisi surat perjanjian pinjaman bermaterai Rp 6.000,00 dan bukti kas keluar UPK sebagai tanda penerimaan uang. Setelah KSM memahami ketentuan pinjaman KSM diminta menanda tangani dokumen surat perjanjian pinjaman dan bukti kas keluar. Setelah itu petugas UPK menyerahkan dokumen tersebut kepada manajer UPK. Manajer UPK kemudian meneliti dokumen yang diserahkan kemudian berkas pinjaman tersebut diadministrasikan. Setelah itu petugas kasir UPK menyerahkan uang ke pengrus KSM menandatangani bukti kas keluar dimana uang bersama tindasan 1 bukti utang keluar diserahkan ke pengurus KSM dan asli disimpan sebagai bukti transaksi.

5. Tahap Pembinaan Pasca Realisasi

Bentuk pinjaman dilakukan dengan melakukan kunjungan silaturahmi menjaga hubungan baik kepada peminjam satu bulan setelah realisasi pinjaman. Kunjungan ketempat usaha peminjam dilakukan dengan tujuan melihat kondisi usaha, melihat

perkembangan usaha peminjam makin berkembang atau makin menurun, melihat tujuan pinjaman digunakan sesuai permohonan atau menyimpang, dan membantu mencari jalan keluar apabila terjadi kendala.

c. Unit Pengelola Sosial (UPS)

Unit Pengelola Sosial adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM/LKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM/LKM mengenai kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Peran UPS adalah mengimplementasikan tugas BKM/LKM dalam peningkatan peran sosial bagi masyarakat miskin, menggalang kepedulian, kerelawan dan solidaritas sosial serta melembagakan nuansa pembelajaran melalui Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK/D) (Kementerian PU, 2012: 03)

Adapun tugas Unit Pengelola Sosial dalam penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Pantia.
- 2) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia bidang sosial.
- 3) Membangun/mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga/infokom.
- 4) Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK/D).

- 5) Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan, beasiswa, sunatan massal, dan lain-lain.
- 6) Menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program sosial UPS.

Kegiatan yang dilakukan oleh UPS adalah kegiatan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja bagi warga miskin. Selain kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan lapangan kerja UPS dapat melaksanakan kegiatan sosial berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan warga dan kebijakan yang telah dibuat. Beberapa program kegiatan yang sering dilaksanakan oleh UPS adalah pelatihan keterampilan, keahlian organisasi, pelatihan kewirausahaan dan wajib belajar 9 tahun. Ada rambu-rambu sosial yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan seerti keberlanjutan kegiatan, dan sebaiknya kegiatan tersebut diprioritaskan untuk kegiatan yang dapat memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

Ketentuan kegiatan UPS sebagaimana yang disebutkan dalam Pedoman Teknis Kegiatan Tridaya (2012) adalah :

- 1) Penerima manfaat adalah rumah tangga miskin berpendapatan rendah yang berada pada wilayah BKM tersebut.
- 2) Jenis kegiatan pengembangan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan warga miskin, kegiatan sosial bidang pemenuhan kebutuhan dasar bertujuan untuk penjaminan kebutuhan dasar seperti sandang papan dan pangan, kegiatan sosial bidang pendidikan bertujuan memberikan kemudahan

akses informasi, kegiatan sosial bidang kesehatan bertujuan memudahkan akses layanan kesehatan.

- 3) Tahapan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi
- 4) Prinsip kegiatan adalah :
 - a) Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian masyarakat.
 - b) Sesuai dengan kegiatan yang diprogramkan oleh PJM Pronangkis.
 - c) Bermanfaat langsung bagi KK miskin.
 - d) Mampu menggalang swadaya masyarakat dan merekatkan solidaritas sosial.
 - e) Berkelanjutan
 - f) Mendukung program perlindungan sosial
 - g) Membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan
 - h) Kemitraan untuk menjaga kesinambungan program.

C. Penelitian Relevan

Studi mengenai kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat telah dilakukan sebelumnya, baik mengenai UPK maupun UPS. Berikut disajikan beberapa ringkasan penelitian yang menjadi referensi dalam penelitian ini :

1. Anita Rahayuningsih (2013) mengenai Efektifitas Penggunaan Pinjaman Bergulir BKM PNPM Mandiri Perkotaan Pada Masyarakat Kecamatan Jepara Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dan faktor-faktor kemacetan dalam pinjaman bergulir. Desain penelitian dengan pendekatan survei. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa rata-rata tingkat efektifitas penggunaan bantuan pinjaman bergulir mencapai 66,61%. Dari hasil analisis faktor terdapat 16 faktor utama yaitu waktu yang dibutuhkan hingga pencairan dana pinjman, lama mendapatkan persetujuan pinjaman dana pinjman BLM, pendidikan, jumlah modal yang dialokasikan untuk usaha dari pinjaman BKM, dan jumlah peningkatan pelanggan setelah 3 bulan mendapatkan pinjman bergulir.
2. Tomy Ardianto (2013) mengenai Efektifitas Pinjaman Bergulir P2KP terhadap Peningkatan Pendapatan KSM di Jaten, Karanganyar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah distribusi frekuensi dan uji paired t-test. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pinjaman bergulir yang diberikan terhadap pendapatan yang diterima KSM setelah KSM mendapatkan pinjaman. Dari penelitian tersebut hasil yang di dapatkan adalah pinjman begulir dapat berjalan dengan baik akan tetapi pemanfaat dari pinjaman tersebut belum tepat sasaran dan penggunaan dana belum maksimal.

3. Ayu Nurmatalita Kartika Dewi (2012) mengenai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Unit Pengelola Sosial Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Karah Sejahtera Di Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Surabaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat yang digunakan. Dari hasil penelitian tersebut startegi pemberdayaan masyarakat yang digunakan mengarah pada *araz mezzo* strategi dengan memberikan pelatihan kepada kelompok. Melalui strategi ini masyarakat dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dan keterampilan. Tujuan strategi *araz mezzo* ini adalah peningkatan kesadaran, peingkatan keterampilan dan sikap-sikap agar mampu mengatasi masalah sendiri dalam kelompok.

D. Kerangka Pemikiran

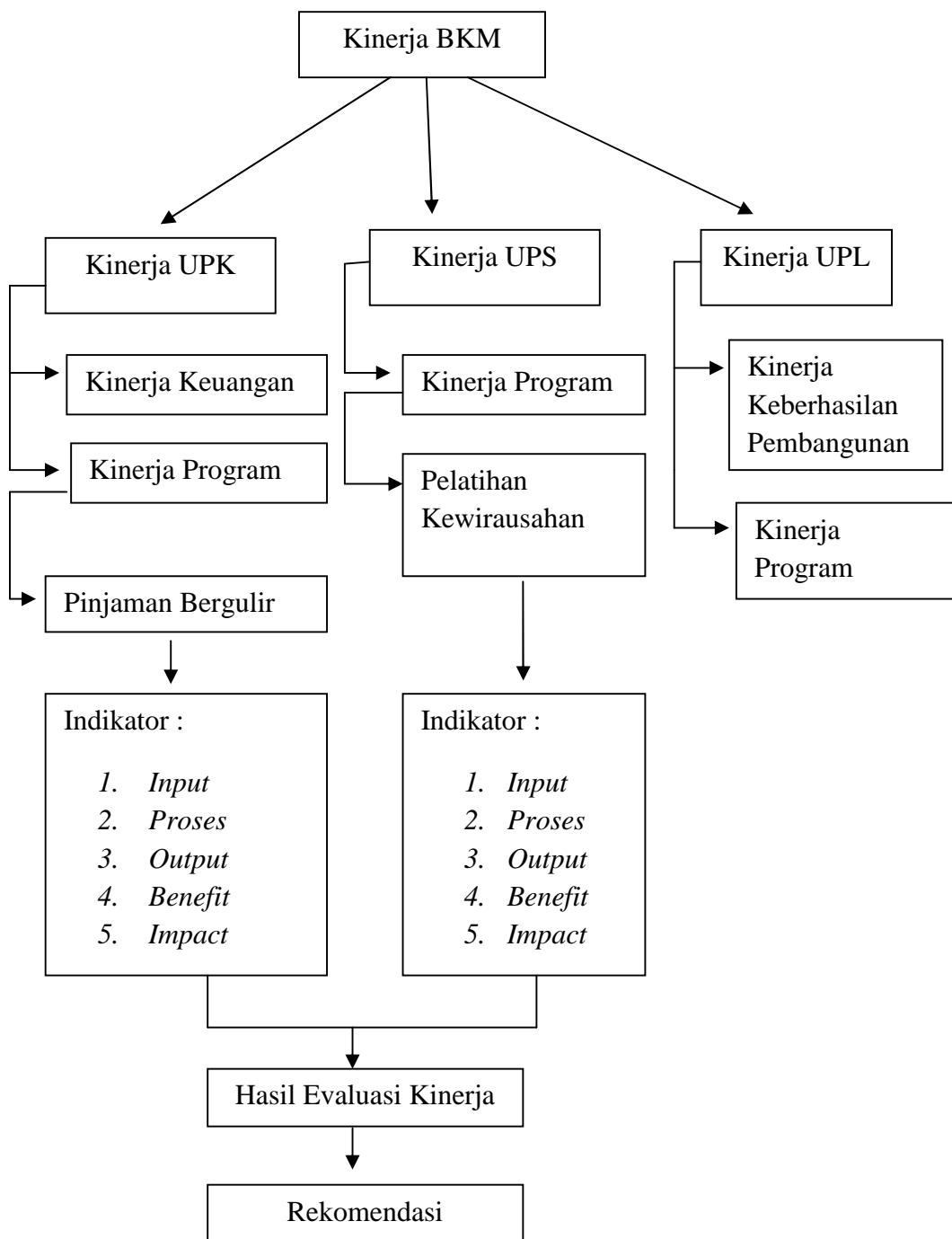
Untuk melihat kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat dapat dilihat dengan evaluasi kinerja tiga unit pengelola yang ada yaitu kinerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang dapat dilihat dengan kinerja keuangan dan kinerja program. Kinerja Unit Pengelola Sosial (UPS) yang dapat dilihat dengan kinerja program. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) yang dapat dilihat dengan kinerja program dan kinerja keberhasilan pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Tridaya. Dalam penelitian ini hanya pelaksanaan pelatihan kewirausahaan. Indikator yang digunakan untuk melihat kinerja tersebut melihat kinerja UPK dalam pengelolaan pinjaman bergulir dan kinerja UPS dalam

pelaksanaan pelatihan kewirausahaan adalah *input, proses, output, benefit, dan impact.*

Kinerja UPK dalam pengelolaan pinjaman bergulir indikator *input* dilihat dari persyaratan pengajuan pinjaman yang meliputi persyaratan KSM dan persyaratan anggota, indikator *proses* dilihat dari proses perguliran dana dari tahap pengajuan hingga pencairan. Indikator *output* dilihat dari penggunaan dana pinjaman dalam kegiatan usaha dan monitoring UPK. Indikator *benefit* dilihat dari manfaat pinjaman bergulir bagi kegiatan usaha. Dan indikator *impact* dilihat dari peningkatan pendapatan sebelum dan setelah program.

Kinerja UPS dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan indikator *input* dilihat dari perencanaan pelatihan dan persyaratan peserta, indikator *proses* dilihat dari pelaksanaan pelatihan dan mekanisme pelatihan. Indikator *output* dilihat dari monitoring setelah pelatihan oleh UPS dan tindak lanjut setelah pelatihan. Indikator *benefit* dilihat dari manfaat setelah pelatihan pada kegiatan usaha. Dan indikator *impact* dilihat dari peningkatan peningkatan kegiatan usaha setelah pelatihan.

Setelah evaluasi kinerja UPK dalam pengelolaan pinjaman bergulir dan UPS dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dilaksanakan, kemudian didapatkan hasil evaluasi. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai rekomendasi kepada pihak terkait. Berikut adalah paradigma pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 4. Paradigma Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu rencana tentang tata cara mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara sistematis dan terarah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Sedangkan pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono (2003: 14), adalah penelitian yang memperoleh data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel tersebut dapat diukur. Seseorang akan mengetahui pengukuran suatu variabel setelah membaca definisi operasional variabel (Masri Singarimbun, 2008:46). Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Kemiskinan

Suatu kondisi dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non-makanan. Kemiskinan diukur menggunakan 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan dimana masyarakat ditetapkan sebagai rumah tangga miskin apabila memenuhi 9 dari 14 kriteria tersebut.

Dari 14 indikator kemiskinan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan yaitu :

- a. Sangat Miskin apabila memenuhi lebih dari 9 indikator.
- b. Miskin apabila memenuhi 9 indikator.
- c. Tidak miskin apabila memenuhi kurang dari 9 indikator

2. Kinerja UPK

Keberhasilan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam pengelolaan kegiatan pinjaman bergulir adalah indikator kegiatan yang dimulai dari *input, proses, output, benefit, dan impact* sesuai dengan tahapan pelaksanaan pinjaman bergulir

PNPM- Mandiri

Tabel 2. Indikator Kinerja UPK dalam Pengelolaan Pinjaman Bergulir

No	Indikator	Penjelasan
1	Input	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan pengajuan KSM b. Persyaratan anggota
2	Proses	Proses Perguliran dana
3	Output	Penggunaan dana masyarakat dan monitoring BKM
4	Benefit	Manfaat dari penggunaan dana pinjaman bergulir
5	Impact	Peningkatan pendapatan setelah menerima program

Dari Indikator tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu:

Kurang Memadai apabila skor total 19-22

Memadai apabila skor total 23-35

Sangat Memadai apabila skor totsl 36-58

c. Kinerja UPS

Keberhasilan Unit Pengelola Sosial (UPS) dalam melaksanakan pelatihan kewirausahaan. Indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan UPS BKM Ngudi Makmur di mulai dari input, proses, output, manfaat dan dampak.

Tabel 3. Indikator Kinerja Unit Pengelola Sosial dalam Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan

No	Indikator	Penjelasan
1	Input	1. Perencanaan pelatihan. 2. Persyaratan pelatihan
2	Proses	1. Pelaksanaan pelatihan 2. Mekanisme pelatihan
3	Output	1. Monitoring setelah pelatihan 2. Tindak lanjut pelatihan
4	<i>Benefit</i>	Manfaat setelah pelatihan pada usaha.
5	<i>Impact</i>	Peningkatan kegiatan usaha usaha setelah pelatihan

Dari Indikator tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu:

Kurang Memadai apabila skor total 9-15

Memadai apabila skor total 16-21

Sangat Memadai apabila skor totsl 22-27

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul pada bulan Maret 2015 sampai dengan April 2015.

D. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto,2010:172). Dalam penelitian ini yanag dimaksud dengan populasi adalah seluruh anggota penerima manfaatkegiatan pinjaman bergulir yang diselenggarakan oleh UPK dan seluruh peserta kegiatan pelatihan UPS. Jumlah populasi pemanfaat program pinjaman bergulir UPK adalah 921, sedangkan jumlah populasi yang menjadi penerima manfaat kegiatan pinjaman bergulir UPK sekaligus penerima manfaat kegiatan pelatihan kewirausahaan UPS adalah 121. Pada penelitian ini subyek penelitian yang digunakan adalah seluruh penerima manfaat kegiatan pinjaman bergulir UPK dan peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan UPS yang memiliki usaha sebanyak 84 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 265) mengumpulkan data merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang

dibutuhkan mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Informasi yang dibutuhkan tersebut dapat berbentuk data primer ataupun data sekunder. Data primer merupakan sumber data atau informasi yang langsung diberikan kepada peneliti dari responden (Sugiyono,2009: 308). Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari subjek atau obyek yang diteliti, akan tetapi didapatkan dari pihak lain seperti instansi atau lembaga yang terkait, arsip perpustakaan dan sebagainya. Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan untuk data primer dengan teknik observasi dan wawancara, sedangkan untuk data sekunder dengan teknik dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010:272). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat gambaran umum daerah penelitian.

2. Angket

Angket adalah alat pengumpulan data dengan memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini digunakan angket tertutup untuk melihat kinerja UPK dan UPS BKM Ngudi Makmur. Skala penilaian yang digunakan adalah skala Likret 3 tingkatan dimana setiap tingkat memiliki skor

yang berbeda. Penskoran yang digunakan adalah 1 untuk opsi A, 2 untuk opsi B, dan 3 untuk opsi C.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang hasilnya dapat berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto,2010: 274). Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi berupa laporan keuangan BKM untuk melihat kinerja Unit Pengelola Keuangan dari indikator keuangan, deskripsi daerah penelitian, gambaran umum, dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melihat data mengenai demografi penduduk, administrasi desa, dan profil BKM Ngudi Makmur.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data demografi penduduk, data kondisi geografi wilayah, profil BKM, dan anget.Instrumen berupa angket digunakan untuk melihat kinerja Unit Pengelola Keuangan dan Unit Pengelola sosial.Angket yang digunakan adalah angket terbuka dan angket tertutup yang terdiri dari 50 pertanyaan.Untuk angket tertutup alternatif jawaban yang disediakan adalah 3 opsi. Untuk opsi A diberi skor 1, untuk opsi B diberi skor 2 dan untuk opsi C diberi skor 3.

Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel Penelitian	Indikator	No. Pertanyaan
1	Kemiskinan	a. Jumlah tanggungan b. Luas lantai c. Konsumsi daging d. Pendidikan Kepala Keluarga e. Pekerjaan & Pendapatan KK f. Jenis lantai g. Jenis dinding h. Tempat berobat i. Kepemilikan barang berharga j. Bahan bakar memasak k. Sumber air minum l. Sarana buang air m. Penggunaan daya listrik n. Kebiasaan makan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2	Kinerja Unit Pengelola Keuangan	a. Tahap Pengajuan(<i>Input</i>) 1) Jumlah anggota KSM 2) Jumlah anggota perempuan 3) Keikutsertaan KSM dalam pelatihan pinjaman bergulir 4) Mekanisme penentuan pinjaman 5) Kunjungan dari BKM 6) Syarat pinjaman 7) Jaminan b. Proses Penerimaan Dana(<i>Procces</i>) 1) Lama proses pencairan dana 2) Besaran biaya administrasi 3) Jangka waktu pemberian kredit 4) Kesesuaian jumlah dana pengajuan dan dana yang diterima c. Penggunaan dana (Output) 1) Kesesuaian penggunaan pinjaman untuk usaha 2) Penyelesaian tunggakan dalam KSM 3) Penggunaan sistem tanggung renteng 4) Kunjungan dari UPK BKM	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

		<p>untuk melihat perkembangan usaha</p> <p>5) Penyelsaian pinjaman bermasalah oleh BKM</p> <p>d. Manfaat Penggunaan Dana(<i>Benefit</i>)</p> <p>1) Penggunaan dana</p> <p>2) Ketercukupan jumlah pinjaman</p> <p>3) Waktu pengembalian (tepat waktu/tidak)</p> <p>4) Perbandingan bunga dengan bunga perbankan</p> <p>e. Dampak Penggunaan Pinjaman (<i>Impact</i>)</p> <p>1) Penadapatan sebelum dan setelah menerima pinjaman bergulir</p>	31
3	Kinerja Unit Pengelola Sosial	<p>a. Tahap Perencanaan Pelatihan(<i>Input</i>)</p> <p>1) Jenis Pelatihan</p> <p>2) Mekanisme pentuan pelatihan</p> <p>3) Syarat mengikuti pelatihan</p> <p>4) Alasan mengikuti pelatihan</p> <p>b. Tahap Pelaksanaan Pelatihan(<i>Procces</i>)</p> <p>1) Lama Pelatihan</p> <p>2) Peran aktif dalam pelatihan</p> <p>c. Monitoring dan Tindak Lanjut (<i>Output</i>)</p> <p>1) Tindak lanjut setelah pelatihan</p> <p>d. Manfaat Mengikuti Pelatihan(<i>Benefit</i>)</p> <p>1) Manfaat pelatihan dalam usaha</p> <p>2) Manfaat pelatihan untuk peserta</p> <p>e. Perkembangan usaha setelah pelatihan (<i>Impact</i>)</p> <p>1) Penerapan ilmu yang diperoleh saat pelatihan dalam usaha.</p> <p>2) Kondisi usaha setelah mengikuti pelatihan</p>	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42,43,44,45,46 47 48 49 50

G. Uji Instrumen

Setelah menyusun instrumen kemudian melakukan uji validitas dan reliabilitas. Tingkat validitas dan reliabilitas menunjukkan mutu pengumpulan data dalam suatu penelitian.

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010: 211). Uji validitas yang digunakan adalah dengan *Pearson*. Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai *Perason Correlation* $> 0,300$. Selain itu dapat pula dilihat dari taraf signifikansi hasil uji t atau t statistik. Apabila taraf signifikansi uji t $< 0,05$ maka instrument tersebut dinyatakan valid (Zainal Mustofa, 2009: 168). Alat uji validitas yang digunakan adalah menggunakan SPSS. Berikut adalah hasil uji validitas untuk instrumen kinerja UPK maupun instrumen kinerja UPS:

Tabel 5. Uji Validitas Instrumen Kinerja UPK dalam Pengelolaan Pinjaman Bergulir

No Butir Soal	Pearson Correlation	Taraf Signifikansi	Keterangan
15	0,420	0,000	Valid
16	0,529	0,000	Valid
17	0,358	0,001	Valid
18	0,544	0,000	Valid
19	0,444	0,000	Valid
20	0,469	0,000	Valid
21	0,431	0,000	Valid
22	0,353	0,001	Valid
23	0,422	0,000	Valid
24	0,509	0,000	Valid
25	0,585	0,000	Valid
26	0,206	0,600	Tidak Valid
27	0,572	0,000	Valid
28	0,543	0,000	Valid
29	0,409	0,000	Valid
30	0,701	0,000	Valid
31	0,523	0,000	Valid
32	0,387	0,000	Valid
33	0,552	0,000	Valid
34	0,446	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Validitas butir pertanyaan dapat dilihat dari hasil korelasi Pearson apabila hasil korelasi Pearson $> 0,300$ maka instrument tersebut dinyatakan valid, selain itu uji validitas juga dilihat dari taraf signifikansi apabila taraf signifikansi $< 0,05$ maka uji validitas dinyatakan valid. Dari 20 butir pertanyaan untuk instrumen UPK terlihat bahwa 19 butir pertanyaan dinyatakan valid sedangkan satu pertanyaan yaitu nomor 26 tidak valid karena nilai korelasi Pearson sebesar 0,206 dengan taraf signifikansi 0,600. Soal pada nomor ini menanyakan mengenai persentase pinjaman yang digunakan untuk

usaha oleh seluruh anggota Alasan butir tersebut tidak valid adalah salah satu syarat pemanfaat program pinjaman bergulir sebagaimana yang ditetapkan dalam petunjuk teknis adalah memiliki usaha sehingga seluruh responden cenderung menjawab sebagian besar digunakan untuk usaha selain itu penggunaan nyata uang pinjaman seorang juga tidak diketahui anggota KSM lain sehingga anggota yang lain berargumen seluruh pinjaman digunakan untuk usaha.

Tabel 6. Uji Validitas Instrumen Kinerja UPS dalam Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan

No Butir Soal	Pearson Correlation	Taraf Signifikansi	Keterangan
37	0,433	0,000	Valid
38	0,614	0,000	Valid
39	0,577	0,000	Valid
40	0,117	0,107	Tidak Valid
41	0,446	0,000	Valid
45	0,585	0,000	Valid
46	0,789	0,000	Valid
47	0,881	0,000	Valid
49	0,702	0,000	Valid
50	0,465	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Validitas butir pertanyaan dapat dilihat dari hasil korelasi Pearson apabila hasil korelasi Pearson $> 0,300$ maka instrument tersebut dinyatakan valid, selain itu uji validitas juga dilihat dari taraf signifikansi apabila taraf signifikansi $< 0,005$ maka uji validitas dinyatakan valid. Dari 10 butir pertanyaan untuk instrumen UPK terlihat bahwa 9 butir pertanyaan dinyatakan valid sedangkan satu

pertanyaan yaitu nomor 40 tidak valid karena nilai korelasi Pearson sebesar 0,177 dengan taraf signifikansi 0,107. Pada butir ini menyakan mengenai frekuensi pelatihan diselenggarakan selama satu tahun. Alasan tidak validnya butir pertanyaan ini karena masing-masing pelatihan hanya diselenggarakan satu tahun sekali. Dan tidak setiap tahun diadakan pelatihan kewirausahaan.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang benar sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2010: 221). Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila koefisien reliabilitas (r_{11}) menunjukkan angka 0,6 (Zainal Mustofa, 2009: 226). Uji reliabilitas instrumen yang digunakan adalah rumus Alpha:

$$r_{11} = \frac{k}{(k-1)} \cdot 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \quad (\text{Suharsimi Arikunto, 2010: 223})$$

r_{11} = reliabilitas instrument

k = banyaknya butir pertanyaan atau butir soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ_t^2 = varians total

Alat yang digunakan untuk melakukan uji reliabilitas adalah dengan SPSS. Uji reliabilitas untuk Instrumen Kinerja UPK dapat dilihat dari nilai reliabilitas konstruk. Dikatakan baik apabila

nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Dari data yang diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,816 sehingga instrumen UPK dinyatakan reliabel. Sedangkan untuk uji reliabilitas instrument UPS diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,792 sehingga instrumen UPK dinyatakan reliabel.

H. Metode Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis Deskriptif

Data yang diperoleh melalui penelitian tersebut kemudian diolah menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Teknik analisis statistik deskriptif yang digunakan adalah dengan distribusi frekuensi menggunakan pendekatan *sturges*. Berikut ini adalah rumus yang digunakan :

a. Kinerja Unit Pengelola Keuangan

Menggunakan Skor Total:

$$\text{Skor Maksimum} = 19 \times 3 = 57$$

$$\text{Skor Minimum} = 19 \times 1 = 19$$

$$\text{Range (Jarak)} = 57 - 19 = 38$$

$$\text{Banyak Kategori} = 3$$

Interval setiap kategori adalah :

$$\frac{\text{Range}}{\text{Kategori}} = \frac{38}{3}$$

$$= 12,67 (13)$$

Setelah ditemukan interval kelas
dikategorikan berdasarkan total skor

Kategori	Skor
Kurang Memadai	19-22
Memadai	23-35
Sangat Memadai	36-58

b. Kinerja Unit Pengelola Sosial

Menggunakan skor total:

$$\text{Skor Maksimum} = 9 \times 3 = 27$$

$$\text{Skor Minimum} = 9 \times 1 = 9$$

$$\text{Range (Jarak)} = 27 - 9 = 18$$

$$\text{Banyak Kategori} = 3$$

Interval setiap kategori adalah :

$$\frac{\text{Range}}{\text{Kategori}} = \frac{18}{3} = 6$$

Setelah ditemukan interval, dikategorika
berdasarkan Total Skor.

Kategori	Skor
Kurang Memadai	9- 15
Memadai	16-21
Sangat Memadai	22-27

Setelah dikelompokan ke dalam setiap kategori, kemudian dicari perentase masing-masing data dengan rumus

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Dimana :

P = Persentase

f = Frekuensi (Jumlah dari masing kategori)

N = Jumlah responden

Setelah ditemukan persentasenya kemudian ditarik kesimpulan dengan memaparkan data secara deskriptif.

2. *Poverty Reduction*

Poverty reduction digunakan untuk mengetahui perubahan penduduk miskin yang terjadi setelah penerimaan program baik UPK maupun UPS. Untuk melihat *poverty reduction* ini sebelumnya menggunakan *headcount ratio* dengan rumus sebagai berikut :

$$HCR = Q/n$$

Dimana :

HCR : Nilai dari *headcount ratio* (Proporsi kemiskinan)

Q : Jumlah penduduk miskin

n : Populasi

Setelah ditemukan *headcount ratio* selanjutnya data tersebut digunakan untuk mengetahui *poverty reduction* setelah pelaksanaan program dengan rumus:

$$PR = (HCR_0 - HCR_1) / HCR_0 \quad (\text{Tri Widodo, 2006})$$

Dimana:

PR : *Poverty reduction* (Pengurangan Kemiskinan)

HCR_0 : Proporsi kemiskinan sebelum pelaksanaan program

HCR_1 : Proporsi kemiskinan setelah pelaksanaan program

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Semanu

a. Letak dan Kondisi Daerah

Desa Semanu adalah salah satu desa di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul dan merupakan ibukota Kecamatan Semanu dan jaraknya dengan ibukota Kabupaten Gunungkidul sejauh 7 Km. Desa Semanu termasuk dalam wilayah timur Kabupaten Gunungkidul dengan batas wilayah administratif:

Sebelah Utara : Kecamatan Karangmojo

Sebelah Selatan: Desa Candirejo, Kecamatan Semanu

Sebelah Barat : Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari

Sebelah Timur : Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu

Desa Semanu terbagi menjadi 19 dusun, 47 RW, dan 135 RT. Secara keseluruhan desa Semanu memiliki luas 2084,4745 Ha yang terdiri dari 1.117,0155 Ha tanah tegalan; 409,255 Ha bangunan; 555,6290 Ha pekarangan; dan sisanya 2,575 Ha digunakan untuk lain-lain. Secara rinci pembagian dusun di wilayah Desa Semanu beserta jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Daftar Dusun, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga Miskin Desa Semanu Tahun 2015

No	Nama Pedukuhan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	%
1	Ngringin	636	36	5,660
2	Sambirejo	1.117	57	5,103
3	Nitikan Barat	1.015	51	5,025
4	Nitikan Timur	1.049	48	4,576
5	Bendorejo	759	35	4,611
6	Pragak	1.050	68	6,476
7	Sokokerep	1.356	51	3,761
8	Munggi	770	41	5,325
9	Wareng	808	58	7,178
10	Tunggul Timur	661	43	6,505
11	Tunggul Barat	905	50	5,525
12	Ngebrak Timur	762	42	5,512
13	Ngebrak Barat	1.007	38	3,774
14	Munggi Pasar	1.186	55	4,637
15	Semanu Utara	521	21	4,031
16	Semanu Tengah	830	41	4,940
17	Semanu Selatan	1.057	54	5,109
18	Tambakrejo	745	55	7,383
19	Clorot	593	31	5,228
Jumlah		16.827	875	5,200

Sumber : Pemerintah Desa Semanu (2015)

Dari data tersebut rata-rata tingkat kemiskinan dari 19 dusun yang ada di Desa Semanu sebesar 5,282% dari total seluruh penduduk. Dari 19 dusun tersebut terdapat 7 dusun yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi dari rata-rata tingkat kemiskinan. Tujuh dusun tersebut adalah Ngringin, Pragak, Wareng, Munggi, Tunggul Timur, Tunggul Barat, dan Tambakrejo.

b. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Semanu menurut data monografi penduduk tahun 2014 adalah 16.827 jiwa, yang terdiri dari 8.478 jiwa penduduk perempuan dan 8.349 jiwa penduduk laki-laki. Sedangkan jumlah rumah tangganya adalah sebanyak 4.976 kepala keluarga. Kepadatan penduduk Desa Semau adalah 8,02 yang artinya setiap 1 km² dihuni oleh 8 jiwa.

Sebagian besar penduduk di Desa Semanu menempuh pendidikan tinggi pada tingkat Sekolah Dasar jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lain jumlah penduduk yang hanya menempuh pendidikan sekolah dasar paling tinggi. Berikut adalah data Jumlah Penduduk menurut jenjang pendidikan adalah:

Tabel 8. Jumlah Penduduk Desa Semanu Tahun 2014 Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Frekuensi	%
PAUD	246	10,082
TK	382	15,656
SD/MI	586	24,016
SMP/MTs	418	17,131
SMA/SMK/MA	304	12,454
D3/S1	196	8,003
Tidak Sekolah	308	12,633

Sumber : Pemerintah Desa Semanu (2015)

Dari data tersebut sebagian besar penduduk Desa Semanu pendidikan tertingginya adalah sekolah dasar sebesar 24,016%, sedangkan jumlah

penduduk yang dapat menempuh hingga peruguran tinggi sebesar 8,003% dan jumlah penduduk yang tidak bersekolah sebesar 12,633%

Secara garis besar penduduk Desa Semanu adalah petani. Jumlah penduduk yang mata pencaahariannya adalah petani sebesar 43,746%. Pertanian yang banyak dilakukan oleh penduduk Desa Semanu adalah sistem pertanian tada hujan. Meski demikian banyak juga penduduk Desa Semanu yang memiliki mata pencaharian lain, secara rinci pembagian penduduk berdasarkan jenis matapencaharianya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Pembagian Penduduk Desa Semanu Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2014

Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
PNS	257	3.568
TNI/Polri	17	0.236
Pegawai Swasta	1202	16.687
Wiraswasta	537	7.455
Petani	3151	43.746
Tukang	304	4.220
Buruh Tani	770	10.690
Pensiunan	154	2.138
Peternak	72	1.000
Lain-lain	53	0.736
Tidak bekerja	686	9.524

Sumber : Pemerintah Desa Semanu (2015)

Kondisi fasilitas publik Desa Semanu sudah tercukupi. Berikut ini adalah tabel mengenai ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan Desa Semanu:

Tabel 10 . Standar Minimal Pelayanan Fasilitas Publik dan Kepemilikan Fasilitas Publik Desa Semanu
 Sumber : Pemerintah Desa Semanu (2015)

Jenis Sarana dan Prasarana	Indikator	Ketersediaan	Rasio	Keterangan
Jalan Kota	Panjang jalan 0,6 Km/ 1.000 penduduk	30 Km	1,782 Km/1.000 penduduk	Tercukupi
Jalan Lingkungan	Panjang 40-60 m, lebar 0,8-2m	Panjang 1 Km, Lebar 2-3 m		Tercukupi
Jalan Setapak	Panjang 5-10m, lebar 0,8-2m	Panjang 500m, lebar 1,5-2m		Tercukupi
Sekolah TK	1 Unit/ 1.000 penduduk	15 Unit	0,891 Unit/ 1.000 penduduk	Belum Tercukupi
Sekolah SD	1 Unit/6.000 penduduk	7 Unit	2,496 Unit/6.000 penduduk	Tercukupi
Sekolah SMP	1 Unit/ 25.000 penduduk	4 Unit	5,943 Unit/ 25.000 penduduk	Tercukupi
Sekolah SMA	1 Unit /30.000 penduduk	2 Unit	3,565 Unit/ 30.000 penduduk	Tercukupi
Puskesmas	1 Unit/120.000 penduduk	1 Unit	7,131 Unit/ 120.000 penduduk	Tercukupi
Pasar Desa	1 Unit/ 30.000 penduduk	2 Unit	3,565 Unit/ 30.000 penduduk	Tercukupi
Tempat Ibadah	1 Unit/ 2.500 penduduk	54 Unit	8,023 Unit/ 2.500 penduduk	Tercukupi
Perpustakaan	1 Unit/ 1.000.000-2.000.000 penduduk	1 Unit	118,857 Unit/ 2.000.000 penduduk	Tercukupi

Keterangan: Jumlah Penduduk Desa Semanu Tahun 2015 adalah 16.827 jiwa

Sumber: Pemerintah Desa Semanu, 2015

Dari data diatas fasilitas publik yang dimiliki oleh Desa Semanu sebagian besar sudah tercukupi, hanya jumlah sekolah TK yang masih belum tercukupi. Ketersediaan fasilitas di atas di sesuaikan dengan indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pekerjaan Umum yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/2001 untuk wilayah Perkotaan.

Walaupun tingkat pendidikan dan fasilitas publik yang tersedia sudah cukup memadai, kesejahteraan masih menjadi maslah yang harus ditanggulangi oleh pemerintah dan masyarakat Desa Semanu. Dari total penduduk tersebut jumlah penduduk miskin hingga tahun 2015 ini adalah sebanyak 875 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah tersebut memang mengalami penurunan.

Tabel 11. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Desa Semanu Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	%
2010-2011	16.535	1.555	9,404
2012-2013	16.888	1.025	6,069
2014-2015	16.827	875	5,200

Sumber : Pemerintah Desa Semanu (2015)

Data kemiskinan yang digunakan tersebut diperbarui setiap 2 tahun sekali. Dari data tersebut terlihat tingkat kemiskinan dari tahun 2010

hingga tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup besar. Pada tahun 2011 hingga tahun 2012 penurunanya sebanyak 3,335% . Sedangkan penurunan jumlah kemiskinan tahun 2013 hingga tahun 2014 yang datanya masih berlaku hingga tahun 2015 ini sebesar 0,869%.Rata-rata tingkat kemiskinan Desa Semanu dari tahun 2010 hingga 2015 adalah 6,891%.Penurunan tingkat kemiskinan yang ada di Desa Semanu tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah melalui Kegiatan pengentasan kemiskinan PNPM-MP.

2. Profil BKM Ngudi Makmur Desa Semanu

a. Sejarah Singkat BKM Ngudi Makmur

Kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-Mandiri Perkotaan merupakan Kegiatan pemerintah yang meitikberatkan pada pemberdayaan institusi masyarakat. Oleh karena itu untuk mencapai tujuanya dibentuklah lembaga penanggulangan kemiskinan di setiap desa yang menjadi penerima dana PNPM-Mandiri Perkotaan. Lembaga tersebut disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).BKM adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.Institusi masyarakat pelaksana Kegiatan PNPM- Mandiri Perkotaan di Desa Semanu bernama BKM Ngudi Makmur. BKM Ngudi Makmur didirikan pada tanggal 28 Januari 2000 dengan disahkan dengan akta notaris No 011 tanggal 24 Februari 2000. BKM Ngudi Makmur memiliki kantor sekertariat yang berada di Kantor Balai

Desa Semanu Jalan Beringin No. 23 Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.

BKM Ngudi Makmur memiliki visi mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Visi tersebut diwujudkan dengan memberdayakan masyarakat desa terutama masyarakat miskin. Pemberdayaan yang dilakukan dapat berupa pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan membudayakan kemitraan baik dengan masyarakat sendiri maupun pihak-pihak lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Sejak awal pembentukanya pada tahun 2000 hingga penelitian ini akan dilakukan telah terbentuk 131 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

b. Kegiatan BKM Ngudi Makmur

Dalam mencapai tujuanya yaitu penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan BKM Ngudi Makmur memiliki 3 unit pengelola yaitu Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Sosial (UPS), dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL). Setiap unit pengelola memiliki wilayah kerja masing-masing akantetapi tetap pada satu tujuan yang sama.

Pada tahap awal pendirian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima oleh BKM Ngudi makmur sebanyak Rp 500.000.000,00. Dana BLM tersebut dialokasikan untuk berbagai

kegiatan, baik untuk kegiatan ketiga Unit Pegelola maupun untuk kegiatan tahap awal berupa pendataan. Untuk Unit Pengelola Lingkungan, tidak hanya menerima dana BLM pada tahap awal saja akantetapi hingga tahun 2010 Unit Pengelola Lingkungan tetap mendapatkan dana BLM. Berikut ini adalah perkembangan dana BLM yang diterima oleh BKM Ngudi Makmur:

Tabel 12. Perolehan Dana BLM BKM Ngudi Makmur 2000-2010

Tahun	Jumlah
2000	Rp 500.000.000,00
2006/2007	Rp 350.000.000,00
2007/2008	Rp 33.000.000,00
2008/2009	Rp 88.500.000,00
2009/2010	Rp 218.240.000,00
JUMLAH	Rp 1.189.740.000,00

Sumber : BKM Ngudi Makmur, 2015

BKM Ngudi Makmur Desa Semanu hanya mendapatkan dana BLM selama 10 tahun yaitu dari tahun 2000-2010. Hal ini dikarenakan kedepnya diharapkan dana tersebut dapat menjadi stimulus perkembangan BKM baik melalui pinjaman bergulir, swadaya masyarakat, dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra BKM. Dana BLM yang diperoleh tersebut kemudian digunakan oleh BKM untuk membiayai kegiatan setiap unit pengelola dan kegiatan BKM lainnya dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Dari dana tersebut persentase penggunaan dana tiap unit adalah sebagai berikut:

Tabel 13.Alokasi Penggunaan Dana BLM BKM Ngudi Makmur Tahun 2000-2010

Pengguna Dana	Jumlah (Rp)	%
UPK	337.000.000,00	28%
UPS	81.900.000,00	7%
UPL	740.840.000,00	62%
Lain-Lain	30.000.000,00	3%
Jumlah	1.189.740.000,00	100%

Sumber : Data diolah, 2015

Dari dana tersebut terlihat bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kegiatan lingkungan yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL) sebesar 62%, selanjutnya sebesar 28% dan digunakan untuk kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK), 7% digunakan oleh Unit Pengelola Sosial (UPS), dan sisanya 3% digunakan untuk lain-lain. Dana lain-lain ini dialokasikan untuk biaya oprasional dan pendataan.

Sesuai dengan visi dan misinya dalam penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit pada BKM Ngudi Makmur tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat agar masyarakat bisa mandiri dan sejahtera.

1) Kegiatan Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan secara garis besar adalah sebagai pelaksana kegiatan keuangan yang sudah disepakati dan di musyawarahkan oleh anggota BKM. Bentuk nyata

kegiatan UPK yang secara langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat adalah menyalurkan dana pinjaman bergulir. Tata cara pengajuan pinjaman bergulir yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang tertera dalam petunjuk teknis pinjaman bergulir yaitu

a) Tahap Pengajuan Pinjaman

Pada tahapan ini pengajuan pinjaman dilakukan secara berkelompok sebelum penentuan jumlah pinjaman yang diajukan masing-masing anggota KSM memberikan data kebutuhan dana usaha sebagai pengajuan atau setiap anggota KSM melakukan musyawarah. Penentuan jumlah pinjaman yang akan diajukan ini tergantung dengan kebijakan dari masing-masing KSM.

Syarat awal yang dibutuhkan untuk pengajuan adalah berita acara pembentukan KSM, aturan main KSM, fotocopy KTP masing-masing anggota KSM, blangko pengajuan pinjaman, dan surat kuasa pencairan tabungan tanggung renteng.

b) Tahap Pemeriksaan

Pada tahapan ini pengurus UPK melakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun

pemeriksaan ke lapangan untuk menentukan layak tidaknya KSM tersebut mendapat pinjaman. Dalam menentukan kelayakan suatu pinjaman petugas UPK berpegang pada petunjuk teknis pinjaman bergulir.

c) Tahap Pencairan

Setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan. Petugas UPK memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada manajer UPK. Selanjutnya manajer UPK beserta pengurus UPK yang ditunjuk memutuskan permohonan pinjaman yang diterima. Setelah permohonan tersebut diputuskan KSM yang permohonan pinjamanya disetujui menyiapkan dokumen untuk realisasi pinjaman yang berisi surat perjanjian pinjaman bermaterai Rp 6.000,00 dan bukti kas keluar UPK yang telah ditandatangani oleh KSM. Setelah itu kasir menyerahkan uang, bukti uang keluar dan kartu pinjaman kepada pengurus KSM.

d) Tahap Monitoring dan Pembinaan

Pembinaan dan monitoring ini dilakukan selain untuk melihat perkembangan usaha dan memberikan masukan juga sebagai suatu sarana untuk menghindari kredit macet. Setiap pengurus UPK diberi

tanggung jawab untuk monitoring dan pembinaan KSM yang berada di dusun tempat pengurus tersebut berdomisili atau berkerjasama dengan kepala dusun.

e) Tahap Pembayaran Kembali

Sebelum tahap pembayaran ini biasanya dua bulan sebelum jatuh tempo pengurus UPK akan mengingatkan waktu jatuh tempo agar masing-masing anggota KSM dapat mempersiapkan. Dokumen yang dibutuhkan adalah Kartu Pinjaman, bukti kas masuk dan kartu tabungan. Dokumen tersebut diserahkan berserta uang (pokok dan jasa) kepada pengurus UPK. Apabila ada KSM yang tidak mampu membayar penyelsaiaanya dapat dilakukan dengan pendekatan pengurus UPK kepada KSM yang bermasalah.

Dana pinjaman bergulir tersebut dapat dimanfaatkan warga khususnya untuk warga yang memiliki usaha dengan modal yang terbatas. Pinjaman yang diberikan jatuh temponya dapat disesuaikan dengan kondisi penerima manfaatKegiatan.Jangka waktu yang biasa diberikan oleh penerima manfaatKegiatan berkisar 12-18 bulan. Bunga pinjaman yang diberikan sebesar 1,5% per bulan. Jika dibandingkan beberapa bank umum bunga tersebut relativ lebih tinggi akan tetapi jika dibandingkan dengan BPR bunga tersebut lebih rendah, berikut

perbandingan bunga UPK BKM Ngudi Makmur dengan bank umum dan BPR:

Tabel 14. Perbandingan Bunga Kredit Usaha Bank Umum, BPR dan UPK BKM Ngudi Makmur Desa Semanu

Bank Umum		Bank Perkreditan Rakyat (BPR)		UPK BKM Ngudi Makmur
Nama Bank	Bunga (%)	Nama Bank	Bunga (%)	1,5% perbulan atau 18% per tahun
Bank Mandiri	22	BPR BDE Yogyakarta	21	
Bank BNI	13			
Bank BRI	19,25			
Bank BTN	17,75			
Bank BPD DIY	8,38			

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dari data tersebut terlihat bahwa bunga yang diberikan oleh UPK BKM Ngudi Makmur jika dibandingkan dengan Bank BTN, BPD DIY, dan BNI lebih tinggi akan tetapi jika dibandingkan dengan BPR BDE Yogyakarta yang merupakan salah satu BPR yang beroperasi di Gunungkidul jauh lebih rendah. Masyarakat lebih memilih meminjam di UPK BKM Ngudi Makmur dikarenakan persyaratan yang dibutuhkan mudah dan tidak memerlukan jaminan seperti sertifikat ataupun BPKB.

Selain itu UPK juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan administrasi keuangan BKM dan melaporkanya kepada

masyarakat pada saat Rapat Warga Tahunan(RWT). Hingga tahun 2015 ini realisasi saldo pinjaman yang mampu di keluarkan oleh UPK BKM Ngudi Makmur sebesar Rp 745.994.529,00 dari modal awal yang diterima oleh UPK BKM Ngudi Makmur sebesar Rp 337.000.000,00. Jika dibandingkan dengan modal awal realisasi pinjaman yang dapat disalurkan ini naik hingga 121,363%. Dari tabel realisasi pinjaman tersebut terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir yaitu dari 2011 hingga Maret 2015 jumlah realisasi pinjaman pertahun mengalami kenaikan. Berikut adalah jumlah realisasi pinjaman yang di salurkan kepada penerima manfaat Kegiatan pinjaman bergulir UPK BKM Ngudi Makmur Semanu selama 5 tahun terakhir:

Tabel 15. Realisasi Pinjaman UPK BKM Ngudi Makmur Semanu Tahun 2011-Maret 2015

Realisasi Pinjaman Awal(Modal Awal UPK)(Rp)	Tahun	Jumlah Realisasi Pinjaman dari Tahun 2000 (Rp)	Pinjaman Per Tahun (Rp)
337.000.000	2011	315.578.529	19.678.000
	2012	341.968.529	26.390.000
	2013	411.878.529	69.910.000
	2014	631.285.029	219.406.500
	Maret 2015	745.994.029	114.709.000

Sumber: BKM Ngudi Makmur Semanu, 2015

2) Kegiatan Unit Pengelola Sosial

Unit Pengelola Sosial adalah unit yang bertugas sebagai pelakasana kegiatan-kegiatan sosial dengan sasaran masyarakat kurang mampu yang sesuai dengan pendataan BKM. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pemberian santunan untuk kaum jompo dan kurang mampu, memberikan pelatihan keterampilan kepada dan masyarakat, dan memberikan beasiswa untuk anak-anak berprestasi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Berikut kegiatan yang dilakukan oleh UPS BKM Ngudi Makmur :

Tabel 16. Kegiatan UPS BKM Ngudi Makmur Tahun 2004-2014

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Volume
1	Pelatihan kader pemetaan swadaya	14 Juni 2004	49 orang
2	Pelatihan Menjahit, Pembukuan dan Komputer	05 Oktober 2002	38 orang
3	Bantuan seragam sekolah dan kelengkapan siswa SD	30 November 2007	114 siswa
4	Pelatihan potong rambut	12-13 Maret 2008	58 orang
5	Pelatihan pembuatan Susu Kedelai dan Kue Pokis	17 Maret 2008	58 orang
6	Bantuan beasiswa	Tahun 2002-2011	57 siswa
7	Santunan warga jompo	Tahun 2003-2014	57 warga

Sumber: BKM Ngudi Makmur (2015)

Kegiatan sosial dan pelatihan kewirausahaan tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatannya terlebih dahulu dilakukan perencanaan kegiatan. Tahap perencanaan kegiatan ini dilakukan pada saat RWT . Pada saat RWT masing-masing peserta rapat mengusulkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh UPS selama 1 tahun kedepan, setelah itu usulan tersebut di saring dan diputuskan kegiatan yang dilakukan. Untuk kegiatan sosial berupa pemberian bantuan, UPS bekerjasama dengan kepala dusun dan petugas keluarahan untuk menentukan warga yang akan mendapatkan bantuan. Untuk kegiatan pelatihan setiap perwakilan dusun memberikan usulan pelatihan apa saja yang akan dilakukan setelah itu akan dipilih suara terbanyak untuk menentukannya.

3) Kegiatan Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

Kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Lingkungan adalah lebih pada pengelolaan fasilitas publik dan infrastruktur pendukung aktifitas masyarakat. Kegiatan yang dilakukan seperti pengecoran jalan desa, pembuatan drainase, dan pembuatan MCK umum untuk masyarakat. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan oleh UPL BKM Ngudi Makmu

Tabel 17. Kegiatan UPL BKM Ngudi Makmur dari Tahun 2000-2014

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Volume	Lokasi
1	Cor Rabat Beton	Tahun 2000	19 unit	19 Dusun
2	Cor Rabat Beton	Tahun 2006-2007	684 m ³	19 Dusun
3	Cor Rabat Beton	Tahun 2007-2008	128,69m ³	3 Dusun
4	Cor Rabat Beton	Tahun 2008-2009	264m ³	3 Dusun
5	Cor Rabat Beton	Tahun 2009-2010	420 m ³	4 Dusun
6	Jambanisasi	Mei 2014	19 unit	19 Dusun

Sumber: BKM Ngudi Makmur, 2015

Kegiatan-kegiatan tersebut selain di danai oleh dana BLM BKM Ngudi Makmur juga berasal dari dana swadaya masyarakat dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikut rincian penggunaan dana sekaligus nilai proyek dari kegiatan UPL BKM Ngudi Makmur :

Tabel 18. Rincian Sumber Dana dan Nilai Proyek UPL BKM Ngudi Makmur Tahun 2000-2014

Nama Kegiatan	Alokasi Penggunaan Dana			Jumlah(Rp)
	UPL (Rp)	Swadaya(Rp)	APBD(Rp)	
Cor Rabat Beton	95.000.000			95.000.000
Cor Rabat Beton	306.100.000			306.100.000
Cor Rabat Beton	33.000.000	19.902.000		52.902.000
Cor Rabat Beton	88.500.000	74.196.075		959.196.075
Cor Rabat Beton	146.240.000	86.433.625	72.000.000	304.673.625
Jambanisasi	30.000.000	15113000		45.113.000
Jumlah(Rp)	1.495.340.000	195.644.700	72.000.000	

Sumber : BKM Ngudi Makmur, 2015

Dengan perbaikan fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan masyarakat mudah dalam melaksanakan aktifitas dandapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sebelum melaksanakan kegiatannya, UPL akan mengadakan perencanaan pembangunan untuk satu tahun. Pada tahap perencanaan ini biasanya pengurus UPL akan melakukan kontrol lapangan mengenai fasilitas publik yang sangat mendesak untuk diperbaiki. Selain kontrol lapangan pengurus juga akan meminta saran dari perangkat desa dan warga masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilakukan. Setelah itu usulan tersebut di bawa pada saat RWT dan ditentukan Kegiatan kerja apa saja yang akan disetujui dan akan dilaksanakan.

Pada saat pelaksanaan pembangunan UPL bekerjasama dengan masyarakat dusun setempat. Masyarakat dilibatkan agar ikut andil dalam Kegiatan tersebut. Keterlibatan masyarakat dapat berupa bantuan tenaga dalam proses penggerjaan dan sumbangan bahan material baik dalam bentuk bahan ataupun uang. Untuk bantuan tenaga biasanya setiap RT dalam satu dusun akan mendapatkan giliran untuk membantu proses penggerjaan fasilitas. Meski demikian setiap harinya UPL menetapkan beberapa orang yang khusus untuk mengerjakan proyek tersebut hingga proyek ini selesai.

Kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh setiap unit pengelola baik UPK, UPS, dan UPL tersebut keseluruhan di dana oleh dana BKM Ngudi Makmur dan pertanggung jawabanya kepada masyarakat dilaksanakan setiap tahun pada Rapat Warga Tahunanan (RWT)

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini responden yang digunakan adalah penerima manfaatkegiatan pinjaman bergulir sekaligus peserta pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh UPS. Pelatihan kewirausahaan tersebut dilaksanakan dari tahun 2002-2008. Jumlah penerima manfaatkegiatan pinjaman bergulir yang mengikuti pelatihan kewirausahaan adalah 121 orang akantetapi jumlah responden yang memiliki usaha sebanyak 86 orang. Sehingga pada penelitian ini lebih di spesifikasikan bagi penerima manfaatkegiatan pinjaman bergulir, yang mengikuti pelatihan, dan memiliki usaha sebesar 86 orang. Meski demikian pada pelaksanya terdapat kendala yang dihadapi peneliti, kendala tersebut adalah 2 responden yang telah pindah kependudukan dan tidak memanfaatkan pinjaman bergulir sehingga jumlah responden hingga akhir penelitian yang berhasil diteliti adalah 84 orang.

a. Jenis Usaha

Jenis usaha yang dimaksud disini adalah jenis usaha yang dilakukan responden yang biayanya mendapat pinjaman dana dari UPK BKM Ngudi Makmur. Jenis usaha yang dilakukan oleh responden adalah :

Tabel 19. Jenis Usaha dan Rata- Rata Modal Responden

Jenis Usaha	Frekuensi	%	Rata-Rata Modal Usaha
Pedagang barang bekas	2	2.381	Rp 7.000.000,00
Jasa	7	8.333	Rp 15.900.000,00
Pembuat Kue	4	4.762	Rp 4.375.000,00
Warung Kelontong	13	15.476	Rp 7.300.000,00
Tengkulak Palawija	5	5.952	Rp 4000.000,00
Pembuat Batako	1	1.190	Rp 1.200.000,00
Mebel	4	4.762	Rp 19.000.000,00
Peternak	3	3.571	Rp 31.670.000,00
Pedagang makanan	13	15.476	Rp 5.850.000,00
Pedagang Non-Makanan	9	10.714	Rp 12.250.000,00
Toko Kelontong	4	4.762	Rp 27.000.000,00
Pedagang Kreditan	3	3.571	Rp 2.500.000,00
Pembuat tempe/tahu	7	8.333	Rp 1.125.000,00
Kerajinan	9	10.714	Rp 4.100.000,00
Jumlah	84	100.000	-

Sumber : Data diolah, 2015

Dari data tersebut jenis usaha yang banyak dilakukan oleh responden penerima manfaat kegiatan pinjaman bergulir UPK dan pelatihan kewirausahaan UPS adalah warung kelontong dan pedagang makanan yaitu masing-masing 15,476%. Pedagang makanan ini bervariasi, terdiri dari pendagang gorengan, bakmi, bakso, warung makan, angkringan dan pedagang sayuran. Sedangkan jenis usaha yang paling sedikit dilajalankan oleh responden adalah pembuatan batako yaitu hanya sebesar 2,381%. Banyaknya jumlah responden yang memilih untuk membuka usaha pada pedagang makanan dan warung

kelontong disebabkan karena rata-rata modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha tersebut tergolong rendah yaitu di bawah Rp 10.000.000,00.

b. Jumlah Pinjaman

Jumlah pinjaman yang dimaksudkan adalah jumlah pinjaman yang dipinjamoleh responden di UPK BKM Ngudi Makmur. Jumlah pinjaman ini dapat mempengaruhi besar/kecilnya usaha yang dilaksanakan.

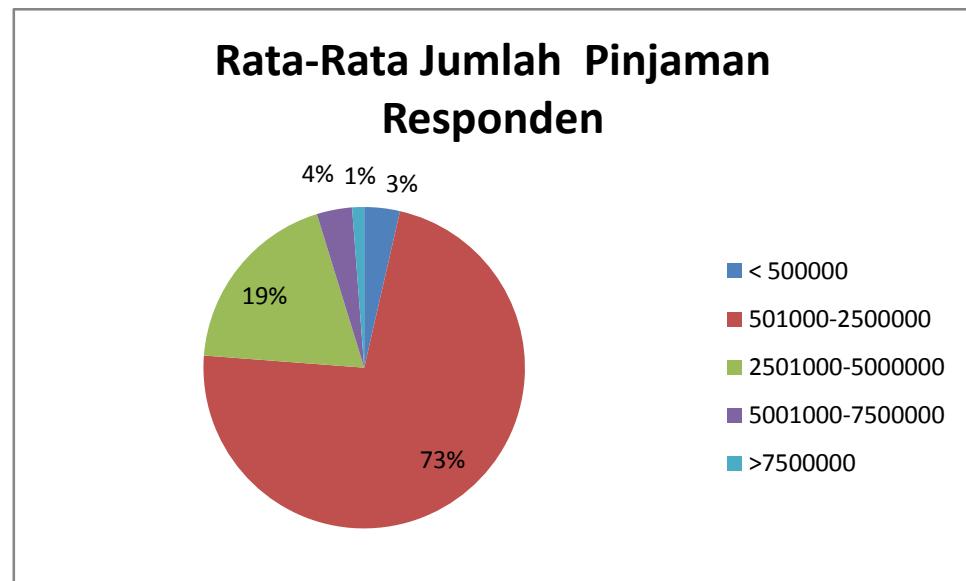


Diagram 1. Rata-Rata Jumlah Pinjaman Responden Pada UPK BKM Ngudi Makmur
Sumber: Data diolah, 2015

Terlihat bahwa sebagian besar responden dalam diagram tersebut sebanyak 73% jumlah pinjamanya berkisar antara Rp 501.000,00-Rp 2.500.000,00. Sedangkan untuk pinjaman Rp 2.501.000-Rp 5.000.000,00

sebanyak 19%, 4% responden jumlah pinjamanya berkisar antara Rp 5.001.000,00-Rp 7.500.000 , 3% responden jumlah pinjaman kurang dari Rp 500.000,00 dan sisanya 1% jumlah pinjamnya diatas Rp 7.500.000,00.

Jumlah pinjaman yang diajukan tersebut dipengaruhi juga oleh jenis usaha yang dijalankan responden dan laba yang diterimanya. Berikut ini adalah data mengenai rata-rata jumlah pinjaman setiap jenis usaha beserta rata-rata laba usaha yang di dapatkan :

Tabel 20. Rata-Rata Pinjaman Responden Pada UPK BKM Ngudi Makmur dan Rata-Rata Laba Setiap Jenis Usaha

Jenis Usaha	Rata- Rata Jumlah Pinjaman	% Rata-Rata Kenaikan Laba
Pedagang barang bekas	Rp 1.750.000,00	59,292
Jasa	Rp 3.000.000,00	40,207
Pembuat Kue	Rp 1.700.000,00	24,615
Warung Kelontong	Rp 2.370.000,00	30,000
Tengkulak Palawija	Rp 1.170.000,00	43,000
Pembuat Batako	Rp 5.000.000,00	0,000
Mebel	Rp 3.450.000,00	16,000
Peternak	Rp 1.300.000,00	98,412
Pedagang makanan	Rp 1.850.000,00	31,423
Pedagang Non-Makanan	Rp 3.187.500,00	48,652
Toko Kelontong	Rp 3.675.000,00	53,846
Pedagang Kreditan	Rp 3.000.000,00	34,642
Pembuat tempe/tahu	Rp 2.130.000,00	20,089
Kerajinan	Rp 1.860.000,00	9,306

Sumber : Data diolah, 2015

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jenis usaha yang rata-rata kebutuhan pinjamanya paling banyak adalah usaha batako akantetapi usaha

tersebut tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak ada kenaikan laba sebelum dan setelah mendapatkan Kegiatan dan usaha pembuatan batako tersebut hanya dilakukan oleh satu orang saja dengan daya serap tenaga kerja yang rendah karena hanya membutuhkan 3 orang tenaga kerja saja. Sedangkan jenis usaha yang rata-rata jumlah pinjamannya sedikit akatetapi dapat berkembang dengan baik karena rata-rata kenaikan laba sebelum dan setelah Kegiatan yang tinggi sebesar 98,412% adalah usaha peternakan. Usaha peternakan ini memang dapat berkembang dengan baik akantetapi dalam pendirianya membutuhkan modal yang tidak sedikit dengan penyerapan tenaga kerja yang tidak banyak karena usaha tersebut hanya membutuhkan 2 orang pekerja saja dan jumlah responden yang manjalankan usaha tersebut hanya 3,571% (Lihat Tabel 23). Sebaiknya UPK BKM Ngudi Makmur lebih menekankan pemeberian pinjaman kepada responden yang memiliki usaha pedagang non-makanan karena jumlah responden yang menjalankan usaha tersebut tergolong tinggi sebesar 10,714% (Lihat Tabel 23) dan rata-rata peningkatan laba sebelum dan setelah Kegiatan termasuk dalam rata-rata tinggi sebesar 48,652%.

2. Kesesuaian Penerima Manfaat Kegiatan Pinjaman Bergulir dan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dengan Kriteria Kemiskinan BPS

Pinjaman bergulir maupun pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh BKM Ngudi Makmur diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu yang mana sebelum program ini dilakukan telah

dilaksanakan pemetaan untuk melihat kondisi masyarakat. Pada penelitian ini untuk melihat kesesuaianpenerima manfaatKegiatan digunakan kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan oleh BPS sebanyak 14 indikator selanjutnya dari 14 indikator tersebut di kelompokan menjadi 3 kriteria sebagai berikut :

- a. Sangat Miskin (SM) apabila memenuhi lebih dari 9 indikator.
- b. Miskin (M) apabila memenuhi 9 indikator
- c. Tidak Miskin (TM) apabila memenuhi kurang dari 9 indikator.

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dalam penyalurannya, penerima manfaatkegiatan pinjamanbergulir maupun peserta pelatihan kewirausahaan tidak tepat sasaran karena sebagianbesar penduduk merupakan penduduk tidak miskin jika dilihat dari 14 indikator BPS. Berikut adalah data kemiskinan responden menurut 14 indikator BPS:

Tabel 21. Data Kemiskinan Penerima ManfaatKegiatan Pinjaman Bergulir dan Pelatihan Kewirausahaan Sebelum dan Sesudah Kegiatan Berjalan

Kategori	Sebelum Kegiatan		Setelah Kegiatan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sangat Miskin	10	11.905	0	0.000
Miskin	11	13.095	7	8.333
Tidak Miskin	63	75.000	77	91.667

Sumber : Data diolah , 2015

Dari data tersebut terlihat bahwa sebelum kegiatan pinjaman bergulir dan pelatihan kewirausahaan diadakan jumlah responden yang berada pada tingkatan Sangat Miskin (SM) sebanyak 10 orang akantetapi setelah mendapatkan Kegiatan tersebut tidak ada lagi responden yang berada pada tingakatan sangat miskin. Pada tingkatan Miskin (M) sebelum mendapatkan Kegiatan jumlah responden yang berada pada tingkatan ini sebesar 11 orang akan tetapi setelah mendapatkan Kegiatan berkurang menjadi 7 orang. Hal yang terjadi pada tingkatan penduduk tidak miskin (TM) justru sebaliknya. Sebelum mendapatkan Kegiatan jumlah penduduk tidak miskin sebesar 63 akantetapi setelah mendapatkan Kegiatan jumlah penduduk bertambah menjadi 77. Jika dilihat secara keseluruhan persentase penduduk yang menerima bantuan dari rumah tangga miskin dan sangat miskin dibandingkan dengan penduduk tidak miskin cenderung lebih sedikit. Sebelum Kegiatan dilaksanakan dari 84 total responden hanya 25 % yang merupakan penduduk miskin dan sangat miskin dan sisasnya 75% adalah penduduk tidak miskin. Hal yang sama juga terjadi pada saat Kegiatan berjalan hingga Maret 2015 persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dari pinjaman bergulir dan pelatihan kewirausahaan sebesar 8,333% dan 91,667% adalah penduduk tidak miskin.

3. Kinerja Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Pinjaman bergulir di UPK BKM Ngudi Makmur digulirkan sejak tahun 2000. Dalam pelaksanaanya kegiatan UPK diatur baik dalam Anggaaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Anggaran Rumah Tangga bunga yang ditetapkan dalam pinjaman bergulir tersebut sebesar 1,5%. Untuk melihat kinerja kegiatan tersebut maka dilakukan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dari tahapan *input*, *proses*, *output*, *impact* dan *benefit* dengan membeberikan 20 pertanyaan kepada responden. Yang terdiri dari 19 pertanyaan tertutup dan 1 pertanyaan terbuka.

Hasil analisis kinerja UPK BKM Ngudi Makmur dalam pengelolaan pinjaman bergulir adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Kinerja UPK BKM Ngudi Makmur dalam Pengelolaan Pinjaman Bergulir

No	Tingkatan Kinerja	Frekuensi	%
1	Kurang Memadai	1	1.190
2	Memadai	58	69.048
3	Sangat Memadai	25	29.762
	Jumlah	84	100.000

Sumber : Data diolah, 2015

Kinerja kegiatan pinjaman bergulir UPK BKM Ngudi Makmur di bagi menjadi 3 yaitu kurang memadai, memadai, dan sangat memadai. Dari hasil yang diperoleh dari 84 responden ditemukan data bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 58

orang menyatakan bahwa kinerja kegiatan UPK BKM Ngudi Makmur memadai jika dilihat dalam persentase sebanyak 69,048%. Selanjutnya sebanyak 25 responden menyatakan sangat memadai atau sekitar 29,762%. Sisanya hanya 1 orang responden yang menyatakan kinerja kegiatan pinjaman bergulir kurang memadai atau jika dilihat dalam persentase sebanyak 1,190%.

Rata-rata pendapatan responden sebelum dan setelah menerima manfaat juga mengalami peningkatan. Sebelum menerima pinjaman bergulir rata-rata pendapatan responden sebesar Rp872.920,00 sedangkan setelah menerima manfaat sebesar Rp1.1125.950,00. Selisih pendapatan sebelum dan setelah menerima manfaat sebesar Rp 253.030,00

4. Kinerja Unit Pengelola Sosial (UPS)

Pelatihan kewirausahaan pada UPS BKM Ngudidi Makmur dilaksanakan dari tahun 2000-2008. UPS BKM Ngudi Makmur telah melaksanakan 5 pelatihan kewirausahaan. Pelatihan tersebut adalah :

Tabel 23. Pelatihan Kewirausahaan UPS BKM Ngudi Makmur

No	Jenis Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Menjahit, Komputer, dan Pembukuan	6 September- 5 Oktober 2002	38
2	Potong Rambut	30 November 2007	58
3	Pembuatan Kue dan Susu Kedelai	12 - 13 Maret 2008	58
Jumlah			154

Sumber : UPS BKM Ngudi Makmur, 2015

Dari seluruh peserta pelatihan kewirausahaan tersebut kemudian diambil sampel peserta pelatihan yang memiliki usaha untuk dilakukan penelitian mengenai kinerja UPS dalam pelatihan kewirausahaan sehingga ditemukan 84 responden. Dari 84 responden tersebut jenis pelatihan yang diikuti yaitu 16 orang menikuti pelatihan menjahit, 8 orang mengikuti pelatihan komputer, 12 orang mengikuti pelatihan pembukuan, 10 orang mengikuti pelatihan pembuatan kue dan susu kedelai, dan 38 orang mengikuti pelatihan potong rambut. Kinerja kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dinilai meliputi aspek *input*, *proses*, *output*, *impact*, dan *benefit*. Terdapat 14 pertanyaan yang ditanyakan terdiri dari 9 pertanyaan tertutup dan 5 pertanyaan terbuka, hasil dari analisis jawaban responden adalah :

Tabel 24. Kinerja UPS BKM Ngudi Makmur dalam Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan

No	Tingkatan Kinerja	Frekuensi	%
1	Kurang Memadai	17	20.239
2	Memadai	59	70.239
3	Sangat Memadai	8	9.524
	Jumlah	84	100

Sumber : Data diolah, 2015

Dari hasil penilaian kinerja Kegiatan pelatihan kewirausahaan terlihat bahwa 59 dari 84 responden menyatakan memadai atau jika dilihat dalam persentase sebesar 70,239%. Sisanya 20,239% menyatakan kinerjanya kurang memadai dan 9,524% menyatakan kinerja pelatihan

kewirausahaan sangat memadai. Untuk tindak lanjut yang dilakukan oleh BKM setelah pelatihan tersebut dilaksanakan adalah :

- 1) Pemberian pinjaman modal yang dananya berasal dari dana pinjaman bergulir UPK BKM Ngudi Makmur dan pemberian peralatan untuk peserta pelatihan potong rambut. Dari 84 responden 63 responden mendapatkan pinjaman modal saja dan sisanya 21 responden mendapatkan pinjaman modal dan peralatan.
- 2) Seluruh peserta pelatihan kewirausahaan mendapatkan pinjaman modal untuk membuka dan memperluas usaha yang dimiliki.

Pelatihan kewirausahaan tersebut tentu saja memberikan manfaat yang banyak bagi peserta responden. Selain manfaat berupa peralatan dan dana pinjaman usaha manfaat lain yang diraskan responden juga dapat dilihat dari bertambahnya keterampilan, motivasi usaha, dan bertambahnya pemasaran. Jika dilihat dalam diagram manfaat pelatihan kewirausahaan adalah:

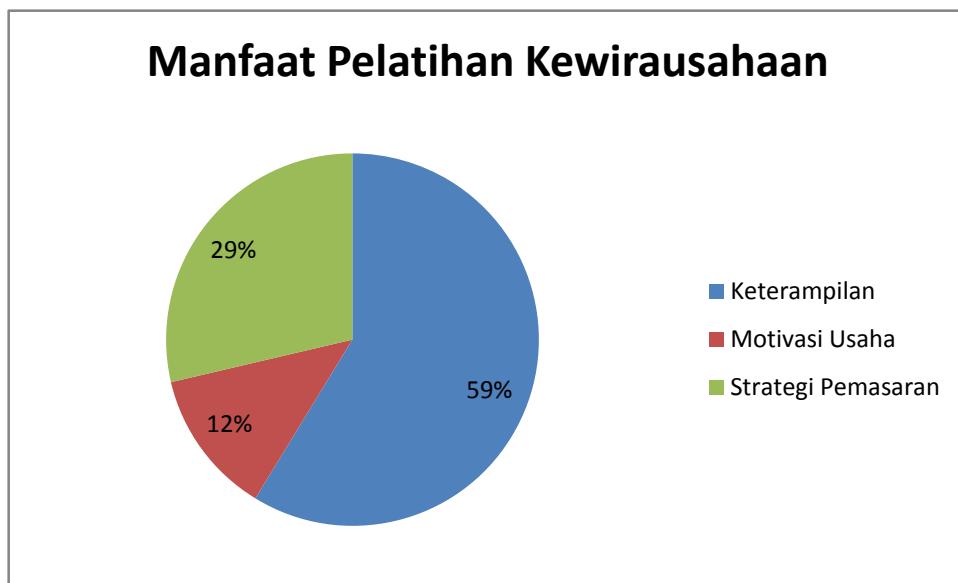


Diagram 2. Manfaat Pelatihan Kewirausahaan

Sumber : Data diolah, 2015

Melihat diagram tersebut manfaat yang didapatkan oleh responden di bagi menjadi 3 yaitu pertama hanya keterampilanbaru, motivasi usaha, dan strategipemasaran. Dilihat dari persentasenya 59% merasakan mendapatkan keterampilan baru, 29% responden mendapatkan strategi pemasaran, dan 12% mendapatkan motivasi usaha.

5. *Poverty Reduction*

Poverty reduction digunakan untuk melihat perubahan penduduk miskin. Perubahan penduduk miskin yang dilihat hanya sebatas penduduk miskin yang menerima Kegiatan pelatihan kewirausahaan dari UPS dan dana pinjaman bergulir dari UPK. Sesuai dengan kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS sebanyak 14 indikator, jumlah penduduk yang berada

pada kategori Miskin dan Sangat Miskin sebelum menerima Kegiatan jumlahnya adalah 21 orang sedangkan 63 orang berada pada kategori Tidak Miskin. Setelah mendapatkan Kegiatan tersebut jumlah penduduk miskin baik yang berada pada kategori Miskin dan Sangat Miskin sebanyak 7 orang sedangkan 77 orang berada pada kategori Tidak Miskin. Untuk melihat *poverty reduction* (reduksi kemiskinan), langkah yang harus dilakukan adalah :

- 1) Menentukan proporsi kemiskinan (*headcount ratio/HCR*) dengan rumus ;

$$HCR = \text{Jumlah penduduk miskin} : \text{Populasi}$$

$$HCR \text{ sebelum} = 21 : 84$$

$$= 0,250$$

$$HCR \text{ setelah} = 7 : 84$$

$$= 0,083$$

- 2) Menentukan *Poverty Reduction* dengan rumus :

$$PR = (HCR \text{ Sebelum} - HCR \text{ Setelah}) : HCR \text{ Sebelum}$$

$$= (0,250 - 0,083) : 0,250$$

$$= 0,668$$

C. Pembahasan

Dari analisis hasil penelitian yang didapatkan dari BKM Ngudi Makmur Desa Semanu, pertanyaan penelitian, teori dan penelitian yang relevan maka dapat di interpretasikan sebagai berikut :

1. Kesesuaian Penerima Manfaat Kegiatan Pinjaman Bergulir dan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dengan Kriteria Kemiskinan BPS

Dari data yang hasil penelitian terlihat bahwa seluruh penerima manfaat pinjaman bergulir dari UPK BKM Ngudi Makmur sekaligus sebagai peserta pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh UPS BKM Ngudi Makmur yang memiliki usaha berjumlah 84 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk miskin sebanyak 21 orang (25%) dengan rincian penduduk sangat miskin sebanyak 10 orang dan penduduk miskin sebanyak 11 orang. Sedangkan jumlah penduduk tidak miskin sebanyak 63 orang (75%). Kondisi demikian juga berlanjut hingga setelah kegiatan terlaksana. Jumlah penduduk miskin penerima manfaat kegiatan sebanyak 7 orang (8,333%) yang semuanya berasal dari kategori penduduk miskin. Sedangkan jumlah penduduk tidak miskin sebanyak 77 orang (91,667%). Jika di sesuaikan dengan syarat penerima manfaat Kegiatan PNPM-MP, baik kegiatan pinjaman bergulir yang dilaksanakan oleh UPK maupun pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh UPS yaitu penerimanya adalah rumah tangga miskin maka syarat tersebut tidak terpenuhi karena jumlah penduduk miskin yang jauh lebih sedikit dari pada penduduk tidak miskin.

Dilihat dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran baik dana pinjaman bergulir dan pelatihan kewirausahaan menurut 14 indikator kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah tidak tepat sasaran karena sebagian besar penduduk tergolong dalam penduduk tidak miskin. Kurang tepatnya sasaran penerima manfaat kegiatan ini salah satu penyebabnya adalah sedikit warga miskin yang memiliki usaha sehingga warga miskin yang tidak memiliki usaha tersebut tidak mengajukan pinjaman dan mengikuti kegiatan pelatihan. Tidak sesuainya penerima manfaat kegiatan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Tommy Ardianto. Kesimpulan tersebut sekaligus menjawab rumusan masalah satu dan dua mengenai kesesuaian penerima manfaat baik pinjaman bergulir dan pelatihan kewirausahaan dengan kriteria kemiskinan BPS.

Penyebab tidak tepatnya sasaran penerima kegiatan ini selain tidak tepatnya seleksi yang dilakukan adalah sebagian besar masyarakat miskin tidak memiliki usaha. Mengingat salah satu syarat pinjaman bergulir adalah memiliki usaha. Selain itu penyebab lain adalah kurangnya sosialisasi juga pembinaan dari pengurus khususnya untuk warga miskin yang belum mendapatkan manfaat Kegiatan dan belum memiliki usaha.

Meski demikian kegiatan tersebut baik pinjaman bergulir yang dilaksanakan oleh UPK dan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh UPS terbukti dapat mengurangi angka kemiskinan yang dibuktikan dengan nilai *poverty reduction*. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *poverty reduction* sebesar 0,668 yang artinya jumlah penduduk miskin dapat berkurang 66,8%.

1. Kinerja Unit Pengelola Keuangan(UPK)

Dari hasil penelitian mengenai kinerja UPK dalam pengelolaan pinjaman bergulir, 69,048% menunjukkan kinerja memadai dengan total skor antara 23-35; 29,762% menunjukkan sangat memadai dengan total skor antara 36-58; dan 1,190% menunjukkan kurang memadai dengan total skor antara 19-22. Kinerja tersebut diukur dari tahapan *input*, proses, *output*, *benefit* dan *impact*. Kesimpulan dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pemberian kegiatan pengentasan berupa pinjaman bergulir secara efektif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukan dengan perbedaan pendapatan sebelum dan setelah Kegiatan yang dibuktikan dengan selisih rata-rata pendapatan responden sebelum dan setelah menerima manfaat pinjaman bergulir. Rata-rata pendapatan responden sebelum menerima manfaat dari pinjaman bergulir sebesar Rp 872.920,00 per bulan, akan tetapi setelah menerima manfaat dari pinjaman bergulir tersebut sebesar Rp

1.1125.950,00 per bulan. Jika dilihat secara nominal pendapatan tersebut mengalami kenaikan akan tetapi kenaikan pendapatan belum memperhitungkan inflasi dari tahun 2000-2015. Selain itu jangka waktu yang dibutuhkan dalam peningkatan pendapatan tersebut cukup lama yaitu 15 tahun dengan kenaikan pendapatan yang tidak begitu tinggi hanya sebesar Rp 253.030,00 atau rata-rata satu tahunnya pendapatan responden naik sebesar Rp 16.900,00. Meski demikian dapat dikatakan pinjaman bergulir tersebut efektif sesuai dengan hasil penelitian Anita Rahayuningsih. Hasil penelitian ini sekaligus menjawab rumusan masalah ketiga mengenai kinerja UPK BKM Ngudi Makmur Desa Semanu dalam pengelolaan pinjaman bergulir.

Antuasiisme penerima manfaat kegiatan yang menyatakan Kegiatan pinjaman bergulir memadai menandakan pinjaman bergulir tersebut memberikan manfaat bagi penerima manfaat Kegiatan. Hal ini berarti tujuan dari dibentuknya PNPM Mandiri Perkotaan dapat terpenuhi dengan pemberdayaan masyarakat melalui kehidupan ekonomi, sebagaimana terdapat dalam UU No. 5 tentang Kegiatan Pembangunan Nasional.

2. Kinerja Unit Pengelola Sosial (UPS)

Dari hasil penelitian mengenai kinerja UPS dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan, 70,239% menunjukkan kinerja memadai dengan total skor antara 16-21; 20,239 % menunjukkan kurang memadai dengan total skor antara 9-15; dan 9,524 % menunjukkan sangat memadai dengan total skor antara 22-27. Kinerja tersebut diukur dari tahapan *input*, proses, *output*, *benefit* dan *impact*. Kesimpulan ini sekaligus jawaban dari rumusan masalah ketiga yaitu kinerja UPS BKM Ngudi Makmur dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan. Responden mendapatkan manfaat dari pelatihan kewirausahaan baik manfaat secara fisik maupun non-fisik. Manfaat secara fisik didapatkan dari pemberian alat-alat untuk beberapa peserta pelatihan dan pinjaman bergulir untuk modal usaha bagi seluruh penerima manfaat Kegiatan. Sedangkan manfaat non-fisik dapat berupa keterampilan baru, motivasi, dan strategi pemasaran. Manfaat paling besar yang dirasakan oleh responden (59%) adalah mendapatkan keterampilan baru setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan pelatihan ini dapat efektif memberikan dampak bertambahnya keterampilan baru warga miskin sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Pedoman Teknis Kegiatan Tridaya.

Antusiasme responden yang menyatakan bahwa kinerja UPS dalam menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan memadai adalah bentuk keberhasilan UPS dalam mengentaskan kemiskinan dengan memberikan lapangan kerja bagi warga miskin. Selain itu menunjukan bahwa UPS BKM Ngudi Makmur telah berhasil menjalankan peran berupa peningakatan peran sosial bagi warga miskin.

Peningakatan peran sosial warga miskin dilakukan dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, strategi ini terbukti dapat meningkatkan peran dan partisipasi warga miskin. Startegi ini disebut dengan *araz mezzo* yaitu dengan memberikan pelatihan kepada kelompok. Kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh UPS BKM Ngudi Makmur dengan strategi *araz mezzo* sebagaimana penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Ayu Nurmatalita Kartika Dewi mampu meningkatakan peran masyarakat yang dibuktikan dengan antusiasme masyarakat yang menayakatan kinerja Kegiatan tersebut memadai. Hasil dari Kegiatan tersebut dapat berjalan lebih maksimal lagi apabila UPS BKM Ngudi Makmur Desa Semanu menyelenggarakan pelatihan tersebut secara berkelanjutan dan berkala setiap tahunya. Karena dilihat dari waktu pelaksanaan terakhir kali pelaksanaan

dilaksanakan adalah tahun 2008 dan setelah tahun tersebut tidak lagi diselenggarakan pelatihan kewirausahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk melihat kinerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Sosial (UPS) pada BKM Ngudi Makmur dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Jumlah pemanfaat kegiatan pinjaman bergulir yang diselenggarakan oleh UPK yang diselenggarakan oleh UPS BKM Ngudi Makmur yang memiliki usaha sebanyak 84 orang. Sesuai dengan kriteria kemiskinan yang ditetapkan BPS, pada tahap seleksi penerima manfaat yang merupakan warga miskin sebesar 25% dan bukan warga miskin sebesar 75%. Sedangkan setelah kegiatan berjalan jumlah penduduk miskin sebesar 8,333% dan penduduk tidak miskin sebesar 91,667%. Penyaluran kegiatan pinjaman bergulir tidak tepat sasaran karena sebagian besar penerima manfaatnya bukan berasal dari masyarakat miskin sebagaimana yang terdapat dalam Petunjuk Teknis PNPM Mandiri Perkotaan dan Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir.
2. Jumlah peserta pelatihan kegiatan pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh UPS BKM Ngudi Makmur yang memiliki usaha dan memanfaatkan pinjaman bergulir sebesar 84 orang. Sesuai dengan kriteria kemiskinan yang ditetapkan BPS, pada tahap seleksi penerima manfaat yang

merupakan warga miskin sebesar 25% dan bukan warga miskin sebesar 75%. Sedangkan setelah kegiatan berjalan jumlah penduduk miskin sebesar 8,333% dan penduduk tidak miskin sebesar 91,667%. Penerima manfaat dari pelatihan kewirausahaan tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis PNPM Mandiri Perkotaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan Tridaya.

3. Kinerja UPK BKM Ngudi Makmur dalam pengelolaan pinjaman bergulir menunjukkan kinerja memadai sebesar 69,048% dengan total skor antara 23-35; sangat memadai sebesar 29,762% total skor antara 36-58; dan kurang memadai sebesar 1,190% dengan total skor antara 19-22, hal ini dibuktikan dengan perubahan pendapatan pemanfaat kegiatan sebelum dan setelah pinjaman bergulir. Akan tetapi perubahan pendapatan tersebut belum memperhitungkan tingkat inflasi selama 15 tahun dan perubahan pendapatan pendapatan per tahunnya hanya sebesar Rp 16.900,00.
4. Kinerja UPS BKM Ngudi Makmur dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan 70,239% menunjukkan kinerja memadai dengan total skor antara 16-21; 20,239 % menunjukkan kurang memadai dengan total skor antara 9-15; dan 9,524 % menunjukkan sangat memadai dengan total skor antara 22-27. Hal ini dibuktikan banyaknya manfaat yang didapatkan peserta pelatihan kewirausahaan baik manfaat secara fisik berupa pemberian peralatan dan pinjaman bergulir maupun manfaat non-fisik yaitu bertambahnya pengetahuan,motivasi, dan strategi usaha. Manfaat paling

besar (59%) yang diraskan oleh peserta adalah meningkatkan keterampilan. Meski demikian banyak terdapat ketidak sesuaian antara jenis usaha yang dijalankan sekarang dengan pelatihan yang diikuti.

B. Saran

1. Kinerja UPK dalam pengelolaan pinjaman bergulir sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan manfaat yang dirasakan oleh penerima manfaat berupa kenaikan laba usaha sehingga kegiatan tersebut perlu didukung keberadaanya untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin. Meski demikian ada aspek yang harus diperbaiki yaitu tahap seleksi penerima pinjaman. Dari penelitian yang dilakukan sebagian besar penerima manfaat adalah rumah tangga tidak miskin hal tersebut tentunya bertentangan dengan Skim pinjaman bergulir, kedepanya diharapkan UPK dapat selektif dalam melakukan seleksi agar pinjaman bergulir tersebut tepat sasaran.
2. Kinerja UPS dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan telah berjalan dengan baik karena kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis Kegiatan Tridaya dan besarnya manfaat yang di rasakan peserta. Ada beberapa hal yang perlu di perbaiki dari kegiatan tersebut agar kedepanya hasil yang di dapatkan maksimal dan tujuan yang di harapkan dapat tercapai. Hal yang perlu diperbaiki adalah :
 - a) Ketepatan sasaran peserta pelatihan karena sebagian besar peserta bukan berasal dari rumah tangga miskin. Di

harapakan UPS selektif dalam memilih peserta pelatihan agar kegiatan tersebut tepat sasaran.

- b) Jenis pelatihan yang dilaksanakan sebagian besar tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan sehingga dampak dari pelatihan tersebut tidak berpengaruh bagi kemajuan usaha kedepanya diharapkan UPS dapat melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mendukung kegiatan usaha masyarakat.
- c) Pelatihan kewirausahaan hanya dilaksanakan satu tahun sekali hal tersebut tentunya akan lebih maksimal jika dijalankan secara berkala.
- d) Kurangnya monitoring setelah pelatihan tersebut di jalankan sehingga peserta yang mendapatkan bantuan berupa peralatan usaha tidak memanfaatkan bantuan tersebut dengan maksimal. Kedepan di harapapkan pihak UPS lebih giat lagi melakukan monitoring setelah pelatihan agar keberlanjutan dari pelatihan tersebut dapat member manfaat.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah :

1. Penerima manfaat yang menjadi responden dalam penelitian ini seluruhnya adalah KSM aktif dan tidak bermasalah sehingga terdapat kecenderungan

skor jawaban yang tinggi. Akan lebih baik jika terdapat proporsi antara KSM aktif dan KSM pasif (bermasalah) sehingga persebaran jawaban lebih merata.

2. Tahapan kegiatan pelatihan kewirausahaan secara rinci tidak terdapat dalam buku Petunjuk Teknis Kegiatan Tridaya atau Modul Kegiatan Unit Pengelola sehingga peneliti menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Andy Kristiawan Soertrisno. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Anita Rahayuningsih. 2013. Efektifitas Penggunaan Pinjaman Bergulir BKM PNPM Mandiri Perkotaan Pada Masyarakat Kecamatan Jepara Tahun 2011. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Volume 10 1 Maret 2013*. STIE Nahdlatul Ulama Jepara

Ayu Nurmalita Kartika Dewi. 2012. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Unit Pengelola Sosial Badan Kswadayaan Masyarakat (BKM) Karah Sejahtera Di Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Surabaya. *Skripsi*. Universitas Airlangga

Bappenas. 2010. *Laporan Akhir Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/ KPS dan Keluarga Sejahtera-I/ KS-I)*. Jakarta: Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kadeputian Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Bappenas. 2012. *Rasio Gini di Indonesia Lima Tahun Terakhir*. Jakarta: Kementerian PPN

Devi Nafiana. 2012. Pengaruh Pinjaman Begulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Di Kota Tasikmalaya. *Skripsi*. Universitas Padjajaran

Dian Novitasari. 2011. Analisis Program PNPM Mandiri terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2009. *Skripsi*. Universitas Negeri Sebelas Maret

Faisal Basri. 1995. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*. Jakarta:Erlangga

Haryono Suyono. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat: Mengantar Manusia Mandiri, Demokratis, dan Berbudaya*. Jakarta: LP3ES

Hasni Yusrianti. 2011. Efektivitas Penyaluran dan Monitoring Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Palembang. *Proseding, Seminar Nasional Hasil Penelitian*. Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya

Kementerian Pekerjaan Umum. 2001. *Pedoman Standar Pelayanan Minimal*. Jakarta : Direktorat Jendral Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Edisi September 2012.* Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum.2012. *Modul Tugas dan Fungsi Unit Pengelola.* Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum.2012. *Pedoman Pelaksanaan Pinjman Bergulir.* Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya

Lembaga Administrasi Negara. 2008. *AKIP dan Pengukuran Kinerja.* Jakarta: LAN

Lemhanas. 1998. *Pembangunan Nasional.* Jakarta: Balai Pustaka

Mason, Robert D. 1996. *Teknik Statistik untuk Bisnis & Ekonomi:* Jilid 1. Jakarta: Erlangga

Masri Singarimbun. 2008. *Metode Penelitian Survai.* Jakarta:LP3ES

Moeheriono. 2012. Indikator Kinerja Utama (IKU). Jakarta: Raja Grafindo Persada

Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Moeljarto. 1995. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arahan dan Strategi.* Yogyakarta: Tiara Wacana

Moh.Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE

Mudrajat Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang.* Jakarta: Erlangga

Mudrajat Kuncoro. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik: Ekonomika Pembangunan.* Jakarta:Erlangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung:Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta

Sunyonto Usman. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tedy PW..., Suwondo, dan Ike W... 2011.Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana PNPM Mandiri untuk

Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik. Volume 2. 433-439*

Todaro, Michael P, Stephen C Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga

Tri Widodo. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN

Tulus TH Tambunan. 2012. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teori dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia

Undang-Undang No 5 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

Zainal Mustofa.2009. *Mengurai Variabel hingga Intrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sumber Internet

Badan Pusat Statistik. 2014.
http://www.bps.go.id/tabs_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1

Ginandjar Kartasasmita. 2003. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. www.ginandjar.com

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015.<http://kbbi.web.id/kinerja>

Kredit Kelompok Pengusaha Mikro BPR BDE. 2015.
<http://bprbde.co.id/index.php/product/25-kredit/5-kredit-kelompok-pengusaha-mikro>

PNPM Mandiri Perkotaan. 2014. http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=32

Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan. 2014. http://www.p2kp.org/Sejarah PNPM Mandiri. 2014. http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=301

Suku Bunga Dasar Kredit, 2015. <http://www.ojk.go.id/sukubunga-dasar-kredit>

Tim Nasional Percepatan Penanaggulangan Kemiskinan. 2014.
<http://www.tnp2k.go.id/>

L

A

M

P

I

R

A

N

ANGKET PENELITIAN

ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK) DAN UNIT PENGELOLA SOSIAL (UPS) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA BKM NGUDI MAKMUR DESA SEMANU GUNUNGKIDUL

Dengan hormat,

Angket penelitian ini dimaksudkan guna memperoleh data mengenai kinerja Unit Pengelola Keuangan dan Unit Pengelola Sosial BKM Ngudi Makmur di Desa Semanu Gunungkidul. Sehubungan dengan ini, peneliti memohon kesediaan responden untuk berpartisipasi dalam mengisi angket ini. Atas bantuan yang diberikan peneliti mengucapkan terimakasih

A. Identitas Responden

Nama Responden	:
Jenis Usaha	:
Lama Usaha	:
Modal Awal Usaha	:
Nama KSM	:
Jumlah Pinjaman	:

Petunjuk Pengisian

- 1) Untuk pertanyaan pilihan ganda pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda sesuai dengan yang dialami dengan memberikan tanda (x) pada salah satu alternatif pilihan jawaban.
- 2) Untuk pertanyaan isian tuliskan jawaban sesuai dengan yang anda alami pada lembar yang telah tersedia.
- 3) Usahakan tidak ada yang terlewatkan

B. Kriteria Kemiskinan :

1. Berapa luas lantai tempat tinggal anda?

Sebelum Program :

- a. Kurang dari $8m^2$ / orang
- b. $8m^2$ /orang
- c. Lebih dari $8m^2$ /orang

Sesudah Program :

- a. Kurang dari $8m^2$ /orang
- b. $8m^2$ /orang
- c. Lebih dari $8m^2$ /orang

2. Berapa kali anda mengkonsumsi daging dalam seminggu ?

Sebelum Program:

- a. 1-3 kali
- b. 3-5 kali
- c. Lebih dari 5 kali

Sesudah Program :

- a. 1-3 kali
- b. 3-5 kali
- c. Lebih dari 5 kali

3. Berapa kali anda dan keluarga membeli baju dalam satu tahun?

Sebelum Program :

- a. 1 kali
- b. 2-3 kali
- c. Lebih dari 3 kali

Sesudah Program:

- a. 1 kali
- b. 2-3 kali
- c. Lebih dari 3 kali

4. Apa pendidikan terakhir kepala keluarga?

Sebelum Program:

- a. Tidak bersekolah
- b. Lulus SD
- c. SMP-SMA

Sesudah Program

- a. Tidak bersekolah
- b. Lulus SD
- C. SMP-SMA

5. Berapa Pendapatan kepala keluarga?

Sebelum Program	Sesudah Program
Jawab:.....	Jawab:.....

6. Jenis lantai tempat tinggal:

Sebelum Program :	Sesudah Program :
a. Tanah	a. Tanah
b. Semen	b. Semen
c. Keramik	c. Keramik

7. Jenis dinding tempat tinggal :

Sebelum Program:	Sesudah Program :
a. Bambu	a. Bambu
b. Kayu	b. Kayu
c. Tembok	c. Tembok

8. Tempat berobat ketika sakit :

Sebelum Program :	Sesudah Program
a. Dukun	a. Dukun
b. Mantri Kesehatan	b. Mantri Kesehatan
c. Dokter	c. Dokter

9. Barang berharga apa saja yang anda miliki ?

Sebelum Program :

Nama Barang	Jumlah	Keterangan
TV		
<i>Handphone</i>		
Perhiasan		
Hewan Ternak		
Sertifikat bangunan		
Sertifikat tanah		

Sesudah Program :

Nama Barang	Jumlah	Keterangan
TV		
<i>Handphone</i>		
Perhiasan		
Hewan Ternak		
Sertifikat bangunan		
Sertifikat tanah		

10. Bahan bakar apa yang digunakan untuk memasak?

Sebelum Program

a. Kayu

b. Minyak tanah

c. Gas

Sesudah Program

a. Kayu

b. Minyak tanah

c. Gas

11. Sumber air minum apa yang anda gunakan ?

Sebelum Program :	Sesudah Program
a. Mata air tidak terlindungi	a. Mata air tidak terlindungi
b. Sumur	b. Sumur
c. PAM	c. PAM

12. Bagaimana sarana buang air besar yang anda miliki?

Sebelum Program :	Sesudah Program :
a. Tidak memiliki/Berkelompok	a. Tidak memiliki/ Berkelompok
b. WC darurat	b. WC darurat
c. WC semi permanen/permanen	c. WC semi permanen/permanen

13. Berapa daya listrik yang digunakan dikeluarga anda?

Sebelum Program:	Sesudah Program:
a. 450 VA	a. 450 VA
b. 900 VA	b. 900 VA
c. 1.300 VA/lebih	c. 1.300 VA/lebih

14. Bearapa kali kebiasaan makan keluarga anda dalam sehari ?

Sebelum Program:	Sebelum Program:
a. 1-2 kali	a. 1-2 kali
b. 3 kali	b. 3 kali
c. Lebih dari 3 kali	c. Lebih dari 3 kali

UNIT PENGELOLA KEUANGAN

a. Pesyaratan Pengajuan (*Input*)

15. Berapa jumlah anggota kelompok anda?

- a. Kurang dari 5 orang
- b. 5 orang
- c. Lebih dari 5 orang

16. Berapa jumlah anggota perempuan dalam KSM anda?

- a. < 30%
- b. 30%
- c. >30%

17. Berapa banyak anggota KSM yang mengikuti pelatihan mnegenai pinjaman
bergulir?

- a. 0 -50%
- b. 50-75%
- c. 76-100%

18. Bagaimana mekanisme penentuan usulan pinjaman bergulir dalam KSM
anda?

- a. Ditentukan oleh pengurus/ketua KSM
- b. Masing-masing anggota mengusulkan
- c. Melalui musyawarah

19. Apakah Sebelum Program mendapatkan dana ada kunjungan dari pihak BKM Ngudi Makmur?

- a. Tidak pernah
- b. Pernah
- c. Sering

20. Bagaimana menurut anda persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan pinjaman bergulir?

- a. Susah
- b. Mudah
- c. Sangat mudah

21. Apakah jaminan yang digunakan untuk pengajuan pinjaman bergulir sudah sesuai dengan usaha anda?

- a. Tidak sesuai
- b. Sesuai
- c. Sangat sesuai

a) Proses Penerimaan Dana (*Procces*)

22. Bagaimana pendapat anda mengenai lama waktu yang dibutuhkan mulai dari tahap pengajuan hingga pencairan dana?

- a. Lama
- b. Cepat
- c. Sangat cepat

23. Bagaimana pendapat anda terhadap besarnya biaya administrasi pinjaman

bergulir yang ditentukan oleh BKM?

a. Tidak sesuai

b. Sesuai

c. Sangat sesuai

24. Apakah waktu kredit pinjaman bergulir yang ditetapkan oleh BKM sesuai

dengan kondisi usaha anda?

a. Tidak sesuai

b. Sesuai

c. Sangat sesuai

25. Apakah besarnya dana pinjaman yang anda terima jumlahnya sesuai dengan

pengajuan?

a. Tidak sesuai

b. Sesuai

c. Sangat sesuai

b) Monitoring Pinjaman Bergulir (*Output*)

26. Apakah semua pinjaman yang diterima oleh anggota kelompok anda

digunakan untuk usaha?

a. 0-50% untuk usaha

b. 51-75% untuk usaha

c. 76-100% untuk usaha

27. Bagaimana sistem penyelsaian yang dilakukan apabila ada salah satu anggota yang menunggak?

- a. Menunda pembayaran ke UPK
- b. Ditanggung ketua KSM
- c. Kekurangan pembayaran ditanggung bersama

28. Apakah semua anggota KSM bersedia menjalankan sistem tanggung renteng?

- a. 0-50% bersedia
- b. 51-75% bersedia
- c. 76-100% bersedia

29. Apakah pengurus UPK BKM Ngudi Makmur melakukan kunjungan setelah penerimaan dana pinjaman untuk melihat perkembangan usaha anda?

- a. Tidak pernah
- b. Kadang-kadang
- c. Selalu

30. Apakah pihak UPK BKM Ngudi Makmur melakukan kunjungan untuk menangani pinjaman yang bermasalah/menunggak?

- a. Tidak pernah
- b. Kadang-kadang
- c. Selalu

C. Manfaat Pinjaman Bergulir (*Benefit*)

31. Untuk apa anda menagajukan pinjaman kepada UPK BKM Ngudi Makmur?

- a. Mencukupi kebutuhan sehari-hari

b. Membayar hutang

c. Modal usaha

32. Berapa persen dana pinjaman dari UPK BKM Ngudi Makmur tersebut

mencukupi kebutuhan usaha anda?

a. 0%-50%

b. 51-75%

c. 76-100%

33. Selama mendapatkan pinjaman dari UPK BKM Ngudi Makmur apakah anda

selalu bisa mengembalikan tepat waktu?

a. Tidak pernah

b. Pernah

c. Sering

34. Bagaimana menurut anda mengenai bunga pinjaman yang ditetapkan oleh

UPK BKM Ngudi Makmur ?

a. Tidak tepat

b. Tepat

c. Sangat tepat

D. Dampak Pinjaman bergulir (*Impact*)

35. Bagaimana kondisi perkembangan usaha anda? (Rata-rata dalam satu bulan)

Sebelum Program :

Total penjualan	Biaya	Laba

Sesudah Program :

Total penjualan	Biaya	Laba

UNIT PENGELOLA SOSIAL

a. Perencanaan Pelatihan (*Input*)

36. Jenis Pelatihan apa yang anda ikuti selama UPS BKM Ngudi Makmur melaksanakan pelatihan kewirausahaan?

Jawab:.....

37. Siapa yang menentukan pelatihan tersebut?

- a. Pengurus BKM
- b. Anggota KSM
- c. Musyawarah bersama

38. Bagaimana menurut anda persyaratan mengikuti pelatihan tersebut?

- a. Susah
- b. Mudah
- c. Sangat mudah

39. Apa sebabnya anda dapat mengikuti pelatihan tersebut?

- a. Penunjukan
- b. Mengajukan diri/mendaftar
- c. Jenis usaha yang sama dengan pelatihan

B. Pelaksanaan dan Mekanisme Pelatihan (*Procces*)

40. Berapa kali pelatihan anda ikuti tersebut dilaksanakan dalam satu tahun?

- a. Satu kali
- b. 2-3 kali
- c. Lebih dari 3 kali

41. Bagaimana peran anda dalam pelatihan tersebut?

- a. Tidak aktif
- b. Aktif
- c. Sangat aktif

C. Monitoring dan Tindak Lanjut Pelatihan (*Output*)

42. Setelah pelatihan tersebut selesai tindak lanjut apa yang dilakukan oleh pihak BKM Ngudi Makmur?

Jawab:.....

43. Apakah setelah pelatihan BKM Ngudi Makmur memberikan modal tunai?

Jawab:.....

44. Apakah setelah pelatihan BKM Ngudi Makmur memberikan peralatan ?

Jawab:.....

45. Digunakan untuk apa saja alat/modal tunai tersebut?

- a. Tidak digunakan

- b. Pembuatan usaha baru
- c. Perluasan usaha

46. Jika setelah pelatihan tersebut selesai dilakukan pemberian alat-alat atau modal tunai tindak lanjut apakah BKM Ngudi Makmur memberikan pendampingan dalam menjalankan usaha?

- a. Tidak Pernah
- b. Kadang-kadang
- c. Sering

D. Manfaat Mengikuti Pelatihan (*Benefit*)

47. Apakah pelatihan tersebut bermanfaat untuk usaha anda?

- a. Tidak bermanfaat
- b. Bermanfaat
- c. Sangat bermanfaat

48. Apa saja manfaat yang anda dapatkan setelah mengikuti pelatihan tersebut?

(Boleh memilih lebih dari satu)

- a. Keterampilan dan pengetahuan baru
- b. Strategi pemasaran baru
- c. Motivasi usaha
- d. Lain-lain, Sebutkan.....

E. Perkembangan Usaha Setelah Mengikuti Pelatihan (*Impact*)

49. Apakah ilmu yang anda terima saat mengikuti melatihan mendukung saat

anda terapkan dalam usaha anda?

- a. Tidak mendukung
- b. Mendukung
- c. Sangat mendukung

50. Bagaimana usaha yang anda jalankan setelah mengikuti pelatihan?

- a. Tidak Maju
- b. Maju
- c. Sangat Maju

**DAFTAR RESPONDEN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN PINJAMAN
BERGULIR**

No	Nama	Jenis Usaha	Nama KSM
1	Suparno	Kerajina bambu	Sumber Barokah
2	Ukik Nugroho	Kerajina bambu	Sumber Barokah
3	Bagiyato	Penjual barang bekas	Restu Mandiri
4	Sunyoto	Laundry	Sido Makmur
5	Isminingsih	Pembuat Kue	Sido Makmur
6	Wahyuningsih	Warung Kelontong	Maju Lancar
7	Supardi	Warung Kelontong	Maju Lancar
8	Partilah	Kerajina bambu	Sido Makmur
9	Painem	Tengkulak Plawija	Sedyo Mulyo
10	Subarno	Pembuat Batako	Sedyo Mulyo
11	Yudi Winarso	Warung Kelontong	Sedyo Mulyo
12	Nanik	Rias Pengantin	Sedyo Mulyo
13	Sutaji	Mebel	Gemilang
14	Eko Aji	Mebel	Gemilang
15	Suyanto	Warung Kelontong	Suka Maju
16	Sepiyono	Warung Kelontong	Suka Maju
17	Eko Suhardono	Potong rambut	Setyo Mulyo
18	Sukino	Sound system	Setyo Mulyo
19	Ngatiman	Angkringan	Setyo Mulyo
20	Edi Nurwanto	Mebel	Sedyo Maju
21	Surahman	Ternak Ayam	Sedyo Maju
22	Wasini	Gilingan gabah	RAS
23	Saminten	Penjual barang bekas	RAS
24	Suwarno	Bakmi	Rukuh
25	Tugiman	GAS LPG	Pelem Agung
26	Ngatinah	Gorengan	Rukuh
27	Purwanto	warung Makan	Guyup Rukun
28	Sakirah	Jual-beli pakaian	Sido Makmur
29	Slamet Riyadi	Jual-beli kayu	Manunggal Cipta
30	Tarkinah	Gorengan	Dadi Subur
31	Sumarno	Pakan ternak	Suka Makmur
32	Witorejo	Pembuat tempe	Suka Makmur
33	Ngatiyo	Pembuat kue	Suka Makmur
34	Pujo Utomo	Pembuat tempe	Suka Makmur

35	Sutiyo	Pembuat tempe	Suka Makmur
36	Wasilan	Bakso	Suka Makmur
37	Triyanto	Es dawet	Suka Makmur II
38	Sugeng	Angkringan	Suka Makmur II
39	Iskhak	Jual-beli Qur'an digital	Suka Makmur II
40	Sarmoi	Warung Kelontong	Suka Makmur II
41	Mudi P	Angkringan	Suka Makmur II
42	Sumaryanto	Toko Kelontong	Sedyo Mulyo I
43	Herman	Kredit barang	Sedyo Mulyo I
44	Sosro Warsito	Kerajinan blangkon	Sedyo Mulyo I
45	Sunarti	Warung Kelontong	Sedyo Mulyo 7
46	Sumiyem	Penjual kue	Sedyo Mulyo 7
47	Tuti	Warung Kelontong	Sedyo Mulyo 7
48	Riswanto	Bengkel Las	Sedyo Mulyo 2
49	Marjono	Jahit	Tambak 1A
50	Wasinah	Tengkulak Plawija	Tambak 1A
51	Ngadi	Warung Kelontong	Tambak 1A
52	Mudiyono	Warung Kelontong	tambak 1B
53	Harujid	Toko Kelontong	Tambak 1B
54	Tuminem	Pembuat tempe	Tambak 1B
55	Wiwit	Warung Soto	Tambak II
56	Tukino	Penjual Rongsok	Tambak II
57	Sumpeno	Dagang Kayu	Manunggal Cipta
58	Jarwo Rahmadi	Dagang sayur	Sedyo Mukti
59	Sudarti	Warung Kelontong	Eko Manunggal
60	Marto Wiyono	Tengkulak Plawija	Sido Makmur
61	Lilis Fitriani	Kredit pakaian	Dadi Subur
62	Edi Sukarno	Warung Kelontong	Wismo Raharjo
63	Ayuningsih	Kredit pakaian	Wismo Raharjo
64	Eko Purnomo	Kerajinan bambu	Sido Makmur
65	Haryanto	Kerajinan bambu	Sido Makmur
66	Partilah	Kerajinan bambu	Sido Makmur
67	Tiyar	Kerajinan bambu	Sido Makmur
68	Yahudi	Kerajinan bambu	Sido Makmur
69	Jami	Dagang kayu	Sedyo Mulyo
70	Catur	Tengkulak Plawija	Eko Manunggal
71	Jarwo Rahmadi	Pembuat Tahu	Sedyo Mukti
72	Mujiman	Pembuat tahu	Sedyo Mukti

73	Nafsin	Peternak Kambing	Terkam Maju
74	Suyanto	Warung Kelontong	Maju Lancar
75	Indra S	warung Makan	Maju Lancar
76	Sri Amin	Penjual batik	Batik Kencana
77	Titik	Penjual batik	Batik Kencana
78	Budi Santosa	Toko Kelontong	Pelem Agung
79	Sutarno	Ternak Ayam	RAS II
80	Tugino	Toko Kelontong	RAS II
81	Basuki	Mebel	Sedyo Maju
82	Sudomo	Tengkulak Plawija	Sido Makmur
83	Danu Diharjo	Dagang sayur	Rukuh
84	Mini	Pembuat kue	Wismo Raharjo

PENGKATEGORIAN JAWABAN RESPONDEN

KINERJA UNIT PENGELOLA KEUANGAN

No	UNIT PENGELOLA KEUANGAN																		35						TOTAL	KET	
																			SEBELUM			SESUDAH					
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	TP	B	L	TP	B	L		
1	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	2	2	3	1	2	3	800	350	450	1400	800	600	41	MEMADAI
2	3	2	2	1	2	3	3	2	3	2	3	1	1	1	2	3	1	1	3	1000	500	500	1200	680	520	39	MEMADAI
3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3	1	1	3	2	3	1	3	3	2000	1200	800	1000	700	300	46	SANGAT MEMADAI	
4	2	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3750	2000	1750	1800	1000	800	44	MEMADAI	
5	2	3	2	2	1	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	1000	500	500	600	300	300	45	SANGAT MEMADAI
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	800	500	300	950	640	310	54	MEMADAI	
7	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	1200	800	400	1600	1000	600	44	MEMADAI
8	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	1	2	2	3	1	2	2	700	300	400	700	300	400	41	MEMADAI
9	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	3	1	1	2	2000	1600	400	3000	2500	500	32	MEMADAI
10	2	1	3	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2	1	3	2	2	2	2000	1600	400	2800	2200	600	37	MEMADAI	
11	2	1	1	2	1	3	2	3	2	2	2	1	1	2	1	1	3	2	3	600	400	200	800	500	300	35	MEMADAI
12	2	2	2	2	1	2	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1	2	3	2500	1500	1000	3000	1800	1200	36	MEMADAI	
13	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2	3	1	2	2	8000	5500	2500	10000	7000	3000	39	MEMADAI

14	2	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3	2	1	3	2	3	1	3	3	7000	5000	2000	7000	5500	1500	46	SANGAT MEMADAI
15	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	700	400	300	1000	600	400	42	MEMADAI
16	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	1000	500	500	2500	800	1700	52	SANGAT MEMADAI	
17	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	1	1	2	3	3	1	3	2	700	250	450	800	300	500	44	MEMADAI
18	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	1	1	1	2	3	1	2	2	6000	4500	1500	9000	6800	2200	39	MEMADAI	
19	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	1	1	3	2	3	1	2	3	1600	950	650	2000	1200	800	43	MEMADAI
20	2	2	1	2	3	3	3	3	2	3	2	1	3	2	3	1	2	3	10000	7000	3000	15000	13000	2000	44	MEMADAI	
21	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	1	2	2	3	1	2	2	5000	4200	800	15000	12000	3000	40	MEMADAI	
22	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	300	175	125	200	150	50	52	SANGAT MEMADAI
23	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	3	2	2	2	1	2	2	2	2500	1600	900	4000	3000	1000	38	MEMADAI
24	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2	3	1	3	2	3000	2600	400	2500	2200	300	41	MEMADAI
25	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3	1	1	3	2	3	1	2	3	7000	5500	1500	8000	6000	2000	44	MEMADAI
26	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	600	400	200	900	600	300	43	MEMADAI
27	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	750	400	350	900	550	350	30	KURANG MEMADAI
28	1	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	1	3	2	800	500	300	1000	650	350	35	MEMADAI
29	3	1	2	2	1	3	3	3	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	3	2500	1300	1200	4000	2500	1500	37	MEMADAI
30	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3	1	1	3	2	3	1	2	3	500	300	200	500	300	200	45	SANGAT MEMADAI	
31	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1200	750	450	4000	3000	1000	41	MEMADAI
32	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	1	2	2	2	3	1	2	3	600	200	400	800	450	350	43	MEMADAI
33	2	2	2	2	1	3	2	3	2	2	3	1	1	3	2	3	1	2	3	1500	800	700	3000	2250	750	40	MEMADAI
34	2	2	3	3	1	2	2	3	2	2	3	2	1	3	2	1	1	3	2	500	200	300	500	200	300	40	MEMADAI

35	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	1	2	2	650	300	350	650	350	300	35	MEMADAI
36	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	6000	5000	1000	6000	5000	1000	44	MEMADAI
37	3	2	1	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	3	2	3	1	2	2	800	450	350	1000	500	500	39	MEMADAI
38	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	1800	1200	600	2500	1500	1000	48	SANGAT MEMADAI	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	3	4000	3200	800	6000	4800	1200	53	SANGAT MEMADAI	
40	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	5000	4200	800	7000	6000	1000	53	SANGAT MEMADAI	
41	3	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	3	1	3	1	2	2	1800	1200	600	1800	1200	600	37	MEMADAI
42	2	1	2	2	1	3	3	3	3	2	2	1	1	3	1	1	1	2	3	15000	12000	3000	20000	15000	5000	37	MEMADAI
43	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	3000	2500	500	4000	3300	700	31	MEMADAI
44	2	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	1	2	2	3	1	2	3	5000	3800	1200	5000	3800	1200	44	MEMADAI
45	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3	1	1	3	2	3	1	2	3	4000	3200	800	5000	4000	1000	45	SANGAT MEMADAI	
46	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2	1	1	2	2	2500	1750	750	4000	2000	2000	36	MEMADAI
47	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	3	1	2	2	2000	1300	700	5000	3800	1200	38	MEMADAI	
48	2	3	1	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	6000	4200	1800	7000	5000	2000	44	MEMADAI
49	3	2	2	3	1	3	3	3	3	2	2	1	1	2	1	1	1	3	3	800	500	300	800	500	300	40	MEMADAI
50	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3	1	1	3	2	3	1	2	3	3500	2200	1300	4000	2500	1500	45	SANGAT MEMADAI	
51	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3	1	1	2	2	3	1	2	3	700	400	300	900	500	400	44	MEMADAI	
52	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2000	1200	800	2400	1200	1200	43	MEMADAI	
53	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	1	2	2	8000	6500	1500	15000	13000	2000	35	MEMADAI	
54	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	1	1	3	1	3	1	2	2	600	300	300	800	400	400	40	MEMADAI	
55	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	3	2	3	1	2	2	4000	2400	1600	5000	3200	1800	40	MEMADAI

56	3	2	3	2	1	3	3	3	3	2	3	1	1	3	2	3	1	2	3	2500	1300	1200	3000	1500	1500	44	MEMADAI
57	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	1	1	3	2	3	1	2	3	2000	1000	1000	4000	2000	2000	45	SANGAT MEMADAI
58	2	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	1600	1200	400	3200	2400	800	46	SANGAT MEMADAI
59	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	4200	3200	1000	6000	4600	1400	32	MEMADAI
60	2	2	2	2	3	2	3	3	3	2	3	2	1	2	2	3	1	2	3	3000	2200	800	5000	3600	1400	43	MEMADAI
61	3	2	1	3	3	3	3	3	3	2	3	1	1	3	2	3	1	3	3	1200	750	450	1500	950	550	46	SANGAT MEMADAI
62	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2	1	1	2	1	3	1	2	2	4000	3200	800	6000	4800	1200	40	MEMADAI
63	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2	3	3	800	500	300	1500	1000	500	50	SANGAT MEMADAI
64	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	1	1	3	2	3	1	2	3	1000	650	350	1200	750	450	46	SANGAT MEMADAI
65	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	750	400	350	1200	600	600	45	MEMADAI
66	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	1	1	3	1	1	1	2	3	1000	600	400	1800	800	1000	39	MEMADAI
67	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	3	1	1	3	2	3	1	2	3	1200	700	500	1200	700	500	45	SANGAT MEMADAI
68	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	1	1	3	2	3	1	2	2	1000	600	400	1500	800	700	43	MEMADAI
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3000	2500	500	4000	3200	800	55	SANGAT MEMADAI
70	2	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3	1	1	2	3	3	1	2	2	3000	2200	800	6000	4500	1500	42	MEMADAI
71	3	2	1	2	3	2	3	3	3	2	3	1	1	3	2	3	1	2	3	4000	2000	2000	5500	3000	2500	43	MEMADAI
72	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	1	1	3	2	3	1	2	3	4000	2000	2000	5500	3000	2500	45	SANGAT MEMADAI
73	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	1	3	2	3	1	3	3	7000	5000	2000	10000	7500	2500	48	SANGAT

KINERJA UNIT PENGELOLA SOSIAL

No	UNIT PENGELOLA SOSIAL														TOTAL	KET
	36	37	38	39	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
1	2	3	2	1	2	1	1	2	1	1	1	A,C	1	2	14	KURANG MEMADAI
2	5	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	A,C	1	1	14	KURANG MEMADAI
3	1	3	2	1	2	1	1	2	2	1	1	A,C	1	3	16	MEMADAI
4	2	3	3	1	2	1	1	2	2	2	2	A,C	2	2	19	MEMADAI
5	4	2	3	3	3	1	1	2	2	2	2	A,B,C	2	2	21	MEMADAI
6	5	3	3	2	3	1,2	1	1	3	1	3	A,C	2	3	23	SANGAT MEMADAI
7	5	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	A,B,C	2	2	19	MEMADAI
8	1	3	2	1	2	1	1	2	2	2	2	A,B,C	1	2	17	MEMADAI
9	4	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	A	1	1	12	KURANG MEMADAI
10	5	2	2	2	2	1,2	1	1	2	1	1	A	1	2	15	KURANG MEMADAI
11	5	2	2	2	2	1	1	2	3	2	1	A,B,C	1	2	17	MEMADAI
12	4	3	2	3	3	1	1	2	1	1	1	A	1	2	17	MEMADAI
13	5	3	2	1	2	1,2	1	2	2	2	2	A	1	2	17	MEMADAI
14	2	3	2	2	3	1	1	2	2	2	2	A	1	3	20	MEMADAI
15	5	3	3	3	2	1,2	1	1	3	3	3	A	2	2	24	SANGAT MEMADAI
16	5	3	3	3	3	1	1	2	1	3	3	A,C	2	3	24	SANGAT MEMADAI
17	5	2	2	3	2	1	1	2	1	1	1	A	1	3	16	MEMADAI
18	5	3	2	1	2	1,2	1	1	3	1	1	A	1	2	16	MEMADAI
19	5	2	2	3	2	1,2	1	1	1	1	1	A	1	2	15	MEMADAI
20	1	3	2	2	3	1	1	2	2	2	2	A	1	2	19	MEMADAI

21	5	3	3	2	2	1,2	1	1	2	2	2	A,C	1	2	19	MEMADAI
22	1	2	3	1	3	1	1	2	3	1	3	A,B,C	2	3	21	MEMADAI
23	1	3	2	3	3	1	1	2	3	3	3	A	2	2	24	SANGAT MEMADAI
24	5	3	2	3	2	1,2	1	1	2	2	2	A	1	3	20	MEMADAI
25	5	3	2	1	2	1,2	1	1	1	1	1	A	1	2	14	KURANG MEMADAI
26	1	3	3	2	3	1	1	2	2	2	2	A,B,C	2	2	21	MEMADAI
27	5	2	2	3	2	1,2	1	1	1	1	1	A,C	1	2	15	MEMADAI
28	1	3	2	1	2	1	1	2	2	1	1	A	1	3	16	MEMADAI
29	2	2	2	1	2	1	1	2	3	1	1	A	1	2	15	MEMADAI
30	4	3	2	1	3	1	1	2	1	1	1	A	1	2	15	MEMADAI
31	5	3	3	2	2	1,2	1	1	2	2	2	A	2	2	20	MEMADAI
32	5	3	2	2	3	1,2	1	1	2	3	2	A	1	2	20	MEMADAI
33	4	3	2	1	3	1	1	2	1	1	1	A	1	2	15	MEMADAI
34	5	3	2	2	2	1,2	1	1	2	2	2	A	1	3	19	MEMADAI
35	5	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	A	1	2	13	KURANG MEMADAI
36	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	A,C	2	3	19	MEMADAI
37	5	3	2	2	3	1,2	1	1	1	2	1	A,C	1	2	17	MEMADAI
38	5	3	3	2	2	1,2	1	1	2	2	2	A	2	3	21	MEMADAI
39	2	2	3	1	2	1	1	2	2	1	2	A	2	3	18	MEMADAI
40	5	3	3	1	3	1,2	1	1	3	3	3	A,C	2	2	23	SANGAT MEMADAI
41	5	2	2	1	3	1	1	2	1	1	1	A,C	1	2	14	MEMADAI
42	5	2	2	1	2	1,2	1	1	1	1	1	A	1	2	13	MEMADAI
43	5	3	2	1	3	1,2	1	1	1	1	1	A	1	2	15	MEMADAI
44	3	3	2	2	2	1	1	2	2	2	2	A,C	1	2	18	MEMADAI
45	1	3	2	1	2	1	1	2	1	1	1	A	1	2	14	KURANG MEMADAI

46	1	3	2	3	2	1	1	2	2	2	2	A	1	2	19	MEMADAI
47	4	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	A,C	1	2	13	KURANG MEMADAI
48	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	A,C	2	3	19	MEMADAI
49	1	2	2	1	3	1	1	2	1	1	1	A,B,C	1	3	15	MEMADAI
50	4	3	2	1	2	1	1	2	2	1	1	A,B,C	1	2	15	MEMADAI
51	5	3	2	1	2	1	1	2	3	1	1	A,B,C	1	2	16	MEMADAI
52	5	3	3	2	2	1	1	2	2	2	2	A	2	2	20	MEMADAI
53	5	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	A	1	2	13	KURANG MEMADAI
54	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	A	1	2	15	MEMADAI
55	1	3	2	1	3	1	1	2	1	1	1	A,C	1	2	15	KURANG MEMADAI
56	5	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	A,B,C	1	2	13	KURANG MEMADAI
57	3	3	2	3	2	1	1	2	1	3	1	A,B,C	1	2	18	MEMADAI
58	5	3	3	2	3	1,2	1	1	2	2	2	A	2	3	22	SANGAT MEMADAI
59	1	3	2	1	3	1	1	2	1	1	1	A	1	2	15	MEMADAI
60	3	3	2	2	3	1	1	2	2	2	2	A,B,C	1	2	19	MEMADAI
61	4	3	2	1	2	1	1	2	2	1	1	A,C	1	3	16	MEMADAI
62	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	A,B,C	1	2	15	MEMADAI
63	1	2	2	2	3	1	1	2	3	2	2	A	2	3	21	MEMADAI
64	5	3	2	2	2	1,2	1	1	1	1	1	A	1	2	15	KURANG MEMADAI
65	3	3	3	2	3	1	1	2	2	2	2	A,C	2	2	21	MEMADAI
66	4	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	A,B,C	1	2	13	KURANG MEMADAI
67	5	3	2	1	3	1	1	2	1	1	1	A	1	2	15	MEMADAI
68	5	3	2	2	2	1	1	2	1	2	1	A	1	2	16	MEMADAI
69	3	3	3	1	3	1	1	2	3	3	3	A	2	3	24	SANGAT MEMADAI
70	5	2	2	1	2	1,2	1	1	1	1	1	A	1	2	13	KURANG MEMADAI

71	5	3	2	1	3	1	1	2	3	1	1	A,B,C	1	2	17	MEMADAI
72	3	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	A,C	1	2	13	KURANG MEMADAI
73	5	3	2	2	2	1	1	2	2	2	2	A	1	3	19	MEMADAI
74	5	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	A,C	1	1	12	KURANG MEMADAI
75	2	3	2	3	3	1	1	2	1	3	1	A,C	1	2	19	MEMADAI
76	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	A,B,C	1	3	15	MEMADAI
77	1	3	2	2	2	1	1	2	2	2	2	A	1	2	18	MEMADAI
78	5	3	2	1	3	1	1	2	1	1	1	A	1	2	15	MEMADAI
79	3	3	3	3	3	1	1	2	2	3	3	A	2	3	25	SANGAT MEMADAI
80	5	2	2	1	2	1	1	2	3	1	1	A	1	3	16	MEMADAI
81	3	3	2	1	2	1	1	2	1	1	1	A,B,C	1	2	14	KURANG MEMADAI
82	5	3	3	2	3	1	1	2	2	2	2	A,C	2	2	21	MEMADAI
83	3	2	2	1	2	1	1	2	3	1	1	A	1	2	15	MEMADAI
84	4	3	2	3	2	1	1	2	1	1	2	A,C	3	3	20	MEMADAI

Keterangan :

Jenis Pelatihan (36)	Kode	Tindaklanjut (42)	Kode	Pemberian Peralatan & Modal	Kode	Manfaat (48)	Kode
Menjahit	1	Pinjam dana usaha	1	Ya	1	Keterampilan	A
Komputer	2	Pemberian peralatan dan pinjaman modal usaha	2	Tidak	2	Motivasi	B
Pembukuan	3					Strategi Pemasaran	C
Pembuatan kue & susu	4						
Potong Rambut	5						

24	q25	q26	q27	q28	q29	q30	q31	q32	q33	q34	Total
.049	.261*	-.102	.031	.127	.255*	.230*	.116	.021	.081	.326**	.420**
.656	.016	.356	.783	.248	.019	.035	.294	.850	.466	.003	.000
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
.266*	.292**	-.117	.314**	.346**	.063	.540**	.296**	.213	.202	.009	.529**
.014	.007	.291	.004	.001	.568	.000	.006	.052	.065	.933	.000
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
.639**	-.097	-.016	.437**	.331**	-.085	.166	.126	.363**	.181	-.050	.358**
.000	.380	.884	.000	.002	.441	.131	.255	.001	.100	.651	.001
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
.230*	.244*	-.030	.399**	.380**	.155	.466**	.049	.266*	.977**	.077	.544**
.036	.025	.783	.000	.000	.158	.000	.658	.015	.000	.487	.000
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
.037	.425**	.166	.068	.063	.094	.219*	.771**	-.047	.149	-.030	.444**
.742	.000	.131	.540	.570	.394	.046	.000	.674	.176	.786	.000
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
.029	.398**	-.320**	-.012	.000	.462**	.196	.069	-.021	.176	.768**	.469**
.790	.000	.003	.913	1.000	.000	.075	.533	.851	.109	.000	.000
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
-.017	.248*	-.332**	-.041	-.137	.346**	.000	.128	-.164	.027	.566**	.431**
.880	.023	.002	.708	.215	.001	1.000	.247	.137	.805	.000	.000
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
.058	.266*	-.408**	.036	-.050	.300**	.154	-.068	.025	.095	.622**	.353**
.600	.014	.000	.746	.652	.006	.161	.539	.824	.392	.000	.001
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
-.050	.254*	-.373**	-.076	-.157	.367**	.000	.107	-.183	.050	.616**	.422**
.652	.020	.000	.495	.153	.001	1.000	.331	.096	.653	.000	.000
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
1	-.125	-.063	.681**	.721**	-.072	.376**	.213	.700**	.214	-.050	.509**

total
.433 ^{**}
.000
84
.614 ^{**}
.000
84
.577 ^{**}
.000
84
-.177
.107
84
.446 ^{**}
.000
84
.585 ^{**}
.000
84
.759 ^{**}
.000
84
.881 ^{**}
.000

.465**
.000
84
1
84



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

157

Alamat : Jl. Brigjen. Katamso No.1 Wonosari Telp. 391942 Kode Pos : 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 328/KPTS/III/2015

Membaca : Surat dari Universitas Negeri Yogyakarta, Nomor : 513/UN.34.18/LT/2015 , hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan kepada : ARUM DANARTI PURNOMO NIM : 11404241024

Nama : Ekonomi / Universitas Negeri Yogyakarta

Fakultas/Instansi : Karangmalang Yogyakarta

Alamat Instansi : Singkar II, Wareng, Wonosari, Gunungkidul

Alamat Rumah : Ijin Penelitian Dengan Judul : "ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLAAN KEUANGAN (UPK) DAN UNIT PENGELOLA SOSIAL (UPS) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA BKM NGUDI MAKMUR DESA SEMANU GUNUNGKIDUL

Keperluan : Desa Semanu, Semanu, Gunungkidul

Lokasi Penelitian : Dr. Sukidjo, M.Pd

Dosen Pembimbing : Mulai tanggal : 19/03/2015 sd. 19/05/2015

Waktunya : Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul).
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada Tanggal 19 Maret 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Camat Semanu Kab. Gunungkidul ;
5. Kepala Desa Semanu, Kec. Semanu. Kab. Gunungkidul ;
6. Arsip.